

PEMBENTUKAN KEVIKEPAN BERBASIS KARESIDENAN: SEJARAH STRATEGI PASTORAL TERITORIAL KEUSKUPAN SURABAYA

Petrus Canisius Edi Laksito
STKIP Widya Yuwana
edilaksito@widyayuwana.ac.id

Abstract:

With its vast scope, the Diocese of Surabaya is divided into 46 parishes grouped in 8 vicariates. In recent pastoral situations, strengthening the vicariate is a priority, but conceptually there has never been any adequate study on this topic. To make an adequate study, this work covers the history of the former residencies of Surabaya, Kediri, Madiun, dan Rembang because in reality the Diocese of Surabaya would later use this colonial administrative basis of the regional government as the basis for dividing its territory into vicariates. Having that rationale, this paper then discusses the formation history of the Diocese of Surabaya and the formation of the vicariates in the territory of the Diocese based on the ex-residencies' territorial administration. After making an analysis on the divisions of the Diocese into vicariates since 1983 this paper ends with a conclusion.

Keywords: *vicariate, residency, history of the Diocese of Surabaya, territorial administration, pastoral strategy.*

1. Pendahuluan

Musyawaharah Pastoral (Mupas) I tahun 2009 menetapkan Arah Dasar (Ardas) “Keuskupan Surabaya sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyub, penuh pelayanan dan misioner.” Untuk merealisasi Ardas di ranah pastoral teritorial Mupas II tahun 2019 membuat Kebijakan Pastoral “mendewasakan paroki berakar lingkungan yang hadir di tengah masyarakat.”

Dalam implementasi Kebijakan Pastoral tersebut pada 2-3 tahun terakhir dirasa perlu memberi perhatian pada penguatan keviikepan sebagai “struktur tengah” antara Keuskupan dan paroki. Sudah sejak Mupas I kegiatan Keuskupan beserta perangkat pastoralnya meningkat, dan dinamika kegiatan di 46 paroki berjalan intensif berkat kepengurusan yang aktif. Namun ketika gerak Keuskupan dan paroki ingin diselaraskan, keviikepan sebagai “struktur tengah” ternyata belum cukup membantu. Setelah 40 tahun lebih Keuskupan dibagi dalam keviikepan-keviikepan, kini saatnya meningkatkan fungsi dan peran “struktur tengah” ini bagi koordinasi antarparoki, antara Keuskupan dan paroki, serta paroki dan Keuskupan.

Melalui “penguatan keviikepan” diharapkan arah gerak Keuskupan Surabaya dalam “mendewasakan paroki berakar lingkungan yang hadir di tengah masyarakat” dapat terlaksana dengan baik. Mengingat tiap keviikepan terbentuk dengan karakter dan ciri khas serta memiliki konteks nyata yang berbeda satu dengan yang lain, maka penguatan keviikepan yang diupayakan juga perlu mencermati unsur-unsur kekhasan ini.

Untuk berkontribusi pada studi tentang keviikepan sesuai kekhasannya, tulisan ini ingin memberi perhatian pada konteks sejarahnya. Perhatian lebih khusus lagi diberikan pada sejarah terbentuknya keviikepan di Keuskupan Surabaya, yang secara khas didasarkan pada tata wilayah berbasis karesidenan.

Untuk itu di sini dibahas beberapa hal. *Pertama*, riwayat pembentukan sistem administrasi pemerintahan sipil eks-Karesidenan Surabaya, Rembang, Kediri, dan Madiun. Pembahasan ini diperlukan karena penentuan wilayah misi maupun pembagiannya ke dalam keviikepan-keviikepan ketika wilayah ini kelak menjadi Keuskupan dipengaruhi oleh sistem ini. *Kedua*, tahap-tahap kehadiran misi di empat Karesidenan. *Ketiga*, riwayat pembagian wilayah Keuskupan

ke dalam kevicepan dari 1983 hingga pembagian tahun 2021. Seluruh pembahasan diharapkan dapat memberi gambaran tentang sejarah kebijakan teritorial dan memberi orientasi bagi Keuskupan dalam “mendewasakan paroki berakar lingkungan yang hadir di tengah masyarakat.” Tulisan ini diakhiri dengan sebuah kesimpulan.

2. Pembahasan

2.1 Sejarah Panggung Teritorial Misi

Studi ini diawali dengan kajian riwayat sistem administrasi berbasis karesidenan yang dikembangkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kajian ini dipilih karena penentuan wilayah misi yang kelak menjadi Keuskupan Surabaya didasarkan pada sistem administrasi ini. Dengan kata lain, dalam sistem administrasi inilah kita jumpai alasan penentuan “panggung teritorial misi”.

Selanjutnya, di panggung ini terdapat dua wilayah dengan riwayat berbeda. Panggung teritorial misi sebelah Timur-Utara Jawa dikuasai VOC sejak 1743, diwarnai oleh sistem pemerintahan Hindia Belanda dengan pendirian Karesidenan Rembang dan Surabaya tahun 1817. Sedangkan panggung teritorial misi di Barat-Selatan menyusul kemudian, sejak wilayah Madiun dan Kediri dikuasai Pemerintah Hindia Belanda dan Karesidenan Madiun dan Kediri didirikan tahun 1830.

2.1.1 Sistem Pemerintahan Hindia Belanda

Sejarah “panggung teritorial misi” yang kelak menjadi Keuskupan Surabaya diawali dengan kisah bangkrutnya VOC, *Vereenigde Oost-Indische Compagnie*, atau Serikat Dagang Hindia Timur, 1799. Karena kebangkrutan itu, seluruh wilayah kekuasaannya di Hindia Timur diambil alih oleh Pemerintah Belanda.

Peralihan kekuasaan ini menandai perubahan sistem kekuasaan Nusantara.

Belanda saat itu dikuasai oleh Perancis. Louis Bonaparte, Raja Belanda, tahun 1808 menunjuk H.W. Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk melaksanakan kebijakan negara induk di seluruh negara jajahan.¹ Jika VOC hanya menuntut pengakuan atas kekuasaannya dan menyerahkan urusan pemerintahan dan hukum pada raja-raja lokal, Kini Daendels mengubah penanganan wilayah secara mendasar, dengan menyusun sistem pemerintahan modern sampai tingkat paling bawah.²

Daendels menjadikan pejabat di bawahnya yaitu Residen bukan lagi utusan atau duta bagi penguasa lokal. Di pusat kerajaan dalam protokoler kerajaan Residen duduk sejajar dengan Raja dan bertugas mengontrol Raja. Bupati menjadi aparatur sipil, digaji pemerintah, dan disupervisi oleh Residen.³

Pada 1811 Daendels berhenti dari jabatan. Hindia Belanda dikuasai oleh Inggris, dan T.S. Raffles ditunjuk sebagai Letnan-Gubernur Jawa. Raffles menganut ideologi pemerintahan yang sama. Ia melanjutkan sistem Daendels. Ketika 1816 Jawa dikembalikan pada Belanda, sistem pemerintahan dilanjutkan. Pada dasarnya sistem pemerintahan Indonesia saat ini merupakan pengembangan sistem yang dibangun kedua tokoh tersebut.⁴

Dalam sistem ini Gubernur Jenderal membawahi Residen sebagai pelaksana pemerintahan di karesidenan atau *residentie*. Di bawahnya terdapat Asisten Residen, pelaksana tugas Residen di wilayah *afdeeling*. Di bawahnya terdapat penanggung jawab wilayah *onder-afdeeling*, disebut *Controleur*. Dalam pengembangannya kelak, di bawah Gubernur Jenderal disisipkan Gubernur sebagai pimpinan provinsi, membawahi beberapa karesidenan.⁵

Pada struktur bawah ditautkan pemerintahan pribumi (*pangreh praja*) sebagai bagian integralnya. Di tingkat *afdeeling* ada Bupati sebagai agen pemerintah pusat dengan sebutan *Regent*. Wilayahnya juga disebut kabupaten

¹ Hanif Nurcholis, *Sejarah Pemerintahan Lokal/Daerah di Indonesia*, Modul 1, MAPU5204, 7

² Nurcholis, *Sejarah Pemerintahan*, 7.

³ M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia since c.1200. Third Edition*, (Hampshire: Palgrave, 2001) 145-147, 148.

⁴ Ricklefs, *A History*, 150.

⁵ Nurcholis, *Sejarah Pemerintahan*, 7-10.

atau *regentschap*. Di bawah Bupati terdapat *District-Hoofd* atau Kepala Distrik atau Wedana, dan di bawahnya *Onder-District Hoofd* atau Camat. Dengan struktur ini terbentuk sistem pemerintahan modern hirarkis-sentralistik, dari struktur teratas sampai desa, nagari, marga, kuria atau sebutan lain sebagai struktur terendah.⁶

2.1.2 Wilayah Timur-Utara

Ditarik ke belakang, pesisir utara Pulau Jawa sampai ke ujung timur dikuasai oleh Mataram sejak 1625, setelah Surabaya berhasil ditaklukkan oleh Sultan Agung. Penaklukan ini menandai kekuasaan Mataram atas seluruh wilayah timur Pulau Jawa.⁷

Pada 1743 kekuasaan di wilayah ini beralih ke VOC setelah konflik antara Pakubuwana II dan VOC, dan konflik antara raja dan para pemberontak dari kalangan istana, berhasil dipadamkan. Karena VOC berjasa memadamkan pemberontakan dan mendudukkan Raja Pakubuwana II kembali ke tahtanya, wilayah Jepara, Rembang, Surabaya, Madura Barat, dan wilayah Tapal Kuda di timur Pulau Jawa, dari Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Jember hingga Banyuwangi diserahkan sepenuhnya kepada VOC. Setelah VOC bangkrut, wilayah ini dikuasai Pemerintah Hindia Belanda.⁸

Pada 1817, setahun setelah pengembalian kekuasaan dari Inggris kepada Belanda, didirikan Karesidenan Rembang, meliputi Kabupaten Rembang, Blora, Bojonegoro, dan Tuban.⁹ Di tahun itu juga didirikan Karesidenan Surabaya, meliputi Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, dan Gresik.¹⁰ Kelak 1928 didirikan Karesidenan Bojonegoro, meliputi Kabupaten Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan, yang dipisahkan dari Karesidenan Rembang. Langkah ini terkait dengan pendirian Provinsi Jawa Timur tahun itu.¹¹ Provinsi Jawa Tengah baru didirikan 1930, dan Karesidenan Rembang termasuk wilayahnya¹²

2.1.3 Wilayah Barat-Selatan

Jika wilayah Timur-Utara sudah lama berurusan dagang dengan VOC dan bahkan dikuasai VOC tahun 1743, daerah Barat-Selatan baru bersentuhan dengan pemerintahan kolonial pada 1830. Mula-mula kawasan Madiun dan Kediri dikuasai oleh Kerajaan Mataram sejak penaklukan oleh Panembahan Senapati pada 1591.¹³ Sejak itu, selama dua setengah abad lebih daerah ini menjadi bagian dari Kerajaan Mataram.¹⁴

Perubahan terjadi setelah Perang Jawa, yang disulut oleh pemberontakan Pangeran Diponegoro tahun 1825, yang berpusat di Yogyakarta tapi meluas hingga ke luar pusat kerajaan yang disebut *mancanegara*.¹⁵

⁶ Nurcholis, *Sejarah Pemerintahan*, 7-10.

⁷ Ricklefs, *A History*, 52.

⁸ Ricklefs, *A History*, 123-124. Selain memperoleh pesisir utara Jawa termasuk kawasan Tapal Kuda, VOC diberi pilihan untuk mengambil jalur sempit di sepanjang pantai dan di sepanjang sungai yang mengalir ke Laut Jawa jika diinginkan. Raja harus menyerahkan beras 5 ribu koyan serta hasil panen lainnya setiap tahun untuk selamanya. Harus ada garnisun VOC di istana. Patih yang dipilih harus disetujui VOC. Selain itu, orang Jawa tidak boleh berlayar ke manapun selain Jawa, Madura, dan Bali.

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Keresidenan_Rembang

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya ,
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Blora

¹¹ <https://bakorwilbojonegoro.jatimprov.go.id/sejarah-provinsi-jawa-timur>

Pembentukan provinsi-provinsi di Hindia Belanda berdasar *Provincie Ordonnantie* (Staatsblad 1924/No. 78). Dalam Mona Lohanda, Iman Hilman, Bastomi Ervan, dan Abdurachman Surjomihardjo. Penyunting:

Anhar Gonggong, M. Soenjanta Kartadarmadja, *Sejarah Sosial DKI Jakarta Raya* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1984), 15.

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah

¹³ Ricklefs, *A History*, 48-51.

¹⁴ Ricklefs, *A History*, 48-51.

¹⁵ *Mancanegara* adalah wilayah kerajaan yang berada di luar *negaragung* (wilayah inti Kerajaan yang berada di sekeliling *kuthanegara* [ibukota Kerajaan]). *Mancanegara* diperintah oleh bupati yang ditunjuk oleh Sultan dan bertanggung jawab kepada Patih.

<https://www.kratonjogja.id/tata-rakiting/19-wilayah-yogyakarta-dari-giyanti-hingga-kini/>

Berdasarkan Perjanjian Giyanti (1755), daerah *mancanegara* Kesultanan Yogyakarta meliputi Wilayah Madiun (Madiun, Magetan, Caruban, sebagian Pacitan), Wilayah Kediri (Kertosono, Berbek, Godcan, Kalangbret, Ngrowo), Wilayah Surabaya (Jepang, Mojokerto), Wilayah Rembang (Jipang, Teras Karas, Ngawen), Wilayah Semarang (Selo atau Seselo,

Pemberontakan berhasil dipadamkan oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1830. Sejak itu wilayah *mananegara*, termasuk Madiun dan Kediri, diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda. dan dijadikan wilayah kekuasaannya.¹⁶

Sejak pengambilalihan ini, pada 1830 didirikan Karesidenan Madiun dan Karesidenan Kediri. Karesidenan Madiun meliputi Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, dan Ponorogo. Pada tahun 1867 Kabupaten Pacitan dimasukkan sebagai bagian Karesidenan Madiun. Karesidenan Kediri meliputi Kabupaten Kediri, Nganjuk, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek. Pada 1928, ketika Provinsi Jawa Timur didirikan, kedua karesidenan yang selama tiga abad lebih berada di bawah kekuasaan Mataram dimasukkan ke dalam Provinsi Jawa Timur bersama Karesidenan Surabaya dan Bojonegoro di Utara-Timur.¹⁷

2.1.4 Kronologi Panggung Teritorial Misi

Dengan gambaran di atas, dapat disusun suatu kronologi teritorial hingga masuknya misi. Dengan kronologi ini disiapkan gambaran keadaan dari sudut garis waktu dan sistem administrasi yang berlaku dalam pemerintahan ketika misi mulai dijalankan. Dalam praktiknya kelak strategi misi ditentukan oleh para misionaris berdasarkan pengamatan atas kondisi khas di karesidenan-karesidenan yang menjadi wilayah misi.

Kronologi ini berawal dari tahun 1591, saat penaklukan oleh Kerajaan Mataram, dan berakhir pada tahun 1930, saat pembentukan

Provinsi Jawa Tengah dengan Karesidenan Rembang sebagai bagiannya. Patut dicatat bahwa pada 1928 terjadi koinsidensi menarik, karena saat pembentukan Provinsi Jawa Timur oleh Pemerintah Hindia Belanda, secara bersamaan Paus Pius XI mendirikan Prefektur Apostolik Surabaya.

Selanjutnya berikut ini adalah kronologi tersebut. Dalam kronologi ini dimasukkan peristiwa penting gerejawi untuk dilihat dalam satu garis waktu:

- 1591, Madiun dan Kediri dikuasai oleh Mataram (P. Senopati);
- 1625, Surabaya, pusat perlawanan terakhir berhasil direbut, sehingga seluruh pantai utara dan bagian timur Pulau Jawa dikuasai oleh Mataram (Sultan Agung);
- 1743, Mataram (Pakubuwana II) menyerahkan pantai utara Pulau Jawa dan Jawa bagian timur kepada VOC;
- 1800, VOC bangkrut tahun 1799, wilayah VOC menjadi wilayah Jajahan Belanda, di bawah Pemerintah Hindia Belanda;
- 1806, Louis Napoleon menjadi Raja Belanda;
- 1807 *Pendirian prefektur Apostolik Batavia*;
- 1808, Sistem administrasi modern mulai diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda;
- 1817, Pembentukan Karesidenan Rembang dan Surabaya;

Warung, Kuwu, Wirosari, sebagian Grobogan). Wilayah-wilayah ini bukan sebuah wilayah utuh, namun terdapat banyak *enklave* maupun *eksklave* wilayah Kasunanan dan Mangkunegaran. Wilayah tersebut berkurang akibat perampasan oleh Daendels dan Raffles. Setelah Perang Diponegoro (1830) pemerintah Hindia Belanda merampas seluruh wilayah *mananegara* melalui Perjanjian Klaten, serta menegaskan wilayah dan batas Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Wilayah Kesultanan Yogyakarta hanya meliputi Mataram dan Gunungkidul seluas 2.902,54 km persegi. Di situ terdapat enklave Surakarta (Kotagede dan Imogiri), Mangkunegaran (Ngawen), dan Pakualaman (Kabupaten Kota Pakualaman). Lihat Bagus Anwar H, *Sejarah Kesultanan Yogyakarta*, Powerpoint Presentation, (Universitas Widya Mataram)

dalam

http://repository.widyamataram.ac.id/uploads/pdfs/4_Modul_Hukum_Keistimewaan_DIY_-_SEJARAH_KESULTANAN_YOGYAKARTA.pdf

¹⁶ Ricklefs, *A History*, 153. Pengambilalihan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab Kerajaan Yogyakarta atas pemberontakan yang menimbulkan kekacauan dan banyak kerugian di Jawa. Sebagian wilayah *mananegara* Kerajaan Surakarta juga diambil alih, sehingga memperluas cengkeraman Hindia Belanda di pulau Jawa.

¹⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Keresidenan_Kediri , https://id.wikipedia.org/wiki/Keresidenan_Madiun , <https://jdih.go.id/files/4/1928STBL236.pdf>

- 1830, Madiun dan Kediri sebagai daerah *mataraman*¹⁸, bersama wilayah *mancanegara* yang lain, diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda dan dijadikan Karesidenan Madiun dan Kediri;
- 1842, kenaikan status *Vikariat Apostolik Batavia*;
- 1867, Kabupaten Pacitan dimasukkan ke dalam wilayah Karesidenan Madiun;
- 1923, kedatangan 5 misionaris CM ke Surabaya, Menangani misi di Karesidenan Surabaya, Rembang, dan Kediri;¹⁹
- 1925, Pendirian Paroki Kediri, pemekaran dari Paroki Madiun;²⁰
- 1928, Bojonegoro dan Tuban dilepaskan dari Karesidenan Rembang, menjadi Karesidenan Bojonegoro, dan Karesidenan Rembang dimasukkan ke Provinsi Jawa Tengah, yang kelak didirikan pada tahun 1930;
- 1928 Pembentukan Provinsi Jawa Timur, dengan memasukkan ke dalamnya Karesidenan Surabaya, Madiun, Kediri, dan Bojonegoro;
- 1928, Pembentukan Prefektur Apostolik Surabaya, meliputi Karesidenan Surabaya, Madiun, Kediri, Bojonegoro, Rembang;
- 1928, Pendirian Paroki Blitar, pemekaran dari Paroki Kediri;
- 1930, Pendirian Provinsi Jawa Tengah, dengan memasukkan Karesidenan Rembang ke dalam wilayah provinsi ini.

2.1.5 Analisis Kewilayahan Misi vs Kewilayahan Pemerintahan

Data menunjukkan bahwa dua provinsi di “panggung teritorial misi”, yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah, baru dibentuk pada 1928/1930, dengan menjadikan beberapa karesidenan yang berdekatan sebagai satu provinsi. Dalam konteks ini Karesidenan Rembang dibagi dua. Karesidenan Bojonegoro

menjadi Karesidenan baru. Rembang masuk Jawa Tengah, Bojonegoro masuk Jawa Timur.

Sementara itu pembagian daerah misi ditentukan sebelumnya. Karesidenan Rembang dan Surabaya sudah berdiri sejak 1817, dan Karesidenan Kediri tahun 1830. Ketiganya dijadikan satu kawasan misi pada 1923. Tahun 1928 Prefektur Apostolik didirikan dan Karesidenan Madiun ditambahkan ke dalamnya.

Dalam situasi ini terlihat bahwa kebijakan kewilayahan Pemerintah Hindia Belanda yang baru tidak sepenuhnya diikuti dengan perubahan wilayah misi. Di satu sisi wilayah Prefektur Apostolik Surabaya bisa diidentikkan dengan separo Provinsi Jawa Timur. Terbukti dari Karesidenan Madiun, yang oleh Pemerintah Hindia Belanda dimasukkan ke dalam Provinsi Jawa Timur, juga dimasukkan dalam Prefektur Apostolik Surabaya. Tapi Karesidenan Rembang, meski masuk ke dalam Provinsi Jawa Tengah, dalam pembagian wilayah misi tetap masuk Prefektur Apostolik Surabaya bersama “pecahannya”, Karesidenan Bojonegoro.

Patut dicatat, penguasaan dua kawasan misi, yaitu Timur-Utara dan Barat-Selatan, mula-mula oleh kerajaan Mataram, lalu VOC dan nanti pemerintah Hindia Belanda sudah berlangsung lama. Di situ sistem karesidenan diterapkan lebih satu abad sebelumnya. Maka patut diasumsikan bahwa sebelum Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dibentuk, dua kawasan ini sudah memiliki pola budaya dan kebiasaan khas yang membentuk lapisan nilai, kesadaran, dan sikap budaya tersendiri. Dalam kondisi ini Prefektur Apostolik Surabaya didirikan tanpa terpengaruh oleh pola administrasi pemerintahan yang baru.

Selanjutnya, selama satu abad lebih sejak pembentukan karesidenan tidak ada “struktur tengah” yang bekerja di antara Gubernur Jenderal di Batavia dan para Residen. Namun setelah provinsi sebagai perangkat baru disisipkan dan mampu bertahan hingga kurang

¹⁸ Disebut *mataraman* karena secara tradisional merupakan daerah kekuasaan Mataram dan mempunyai kedekatan budaya dengan Mataram.

¹⁹ Wilayah yang diberikan sebagai daerah misi romo CM pada 1923 meliputi 3 karesidenan ini.

²⁰ Paroki Kediri pemekaran dari Paroki Madiun ditangani oleh romo-romo CM. Paroki Madiun pada 1925 masih ditangani romo-romo Jesuit.

lebih satu abad di tahun 2025, padahal pada kurun yang sama struktur karesidenan dihapus, maka sebenarnya terlihat peralihan sistem administrasi, dari pemerintahan dengan karesidenan sebagai kepanjangan tangan, beralih menempatkan provinsi sebagai kepanjangan tangan yang baru.

Di sisi lain, dalam kurun satu abad yang sama, penataan kewilayahan gerejawi di Keuskupan Surabaya dari era Prefektur Apostolik tahun 1928 hingga tahun 2025 konsisten memakai “model karesidenan” yang justru ditinggalkan oleh Pemerintah Indonesia. Ini terlihat dari penataan kewilayahan gerejawi berbasis kevikapan yang diletakkan di atas struktur eks-karesidenan. Jika dulu karesidenan mencakup beberapa kabupaten, kini kevikapan mencakup beberapa paroki yang dikelompokkan seturut pembagian wilayah karesidenan.

Maka dalam arti tertentu terlihat keberlanjutan struktur kewilayahan lama bercorak sipil ke wajah baru gerejawi. Meski dalam administrasi pemerintahan sipil struktur karesidenan tidak dipakai, tapi dalam lingkup administrasi gerejawi struktur model ini mendapat tempat. Jika dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda pernah terdapat garis langsung dari Gubernur Jenderal ke Residen yang membawahi beberapa kabupaten, dalam administrasi gerejawi saat ini terdapat garis langsung dari Uskup ke Vikap, yang menjadi ordinaris wilayah di kevikapan dan mengkoordinasi beberapa paroki. Jika saat ini “penguatan kevikapan” digaungkan, maka aspek-aspek karesidenan mungkin perlu dikaji bagi reksa pastoral di masa depan.

2.2 Karya Misi dalam Perspektif Kewilayahan

Setelah melihat sejarah panggung teritorial misi Keuskupan Surabaya dari sisi administrasi pemerintahan Hindia Belanda, khususnya di level karesidenan, studi ini memberi perhatian pada sisi historis kehadiran misi dan pembagian wilayah di atas panggung itu. Studi dimulai dari keberadaan Gereja Katolik di Hindia Belanda, karena dari sinilah dilakukan pembagian wilayah-wilayah misi, termasuk

wilayah misi yang kini menjadi Keuskupan Surabaya.

Pada 1807, setahun menjelang kedatangan Daendels, didirikan Prefektur Apostolik Batavia. Status gerejawi ini tahun 1842 diangkat menjadi Vikariat Apostolik dan disusul dengan pembagian wilayah-wilayah misi di seluruh Hindia Belanda sejak 1902. Rupanya, sistem kewilayahan sipil yang terbangun turut berpengaruh terhadap pembagian wilayah gerejawi setidaknya di pulau Jawa, yang dilakukan dalam konteks administrasi pemerintahan tingkat karesidenan.

Tidak kalah penting dicatat adalah kehadiran misi Gereja Katolik di seluruh Hindia Belanda sejak 1902 yang berlangsung cepat, menandai arah baru pada upaya misi bagi penduduk setempat. Dalam konteks keterarahan pada upaya misi, pembagian wilayah dan penyerahan karya misi kepada tarekat religius bukan sekedar pembagian tugas tanpa makna atau orientasi. Pembagian wilayah ini berarti kejelasan: kepada siapa, dalam konteks apa, dan dengan cara apa misi di tiap wilayah mengarahkan diri.

Dengan perspektif kewilayahan, misi berarti keterarahan khas, pilihan menjadi lebih peka pada lingkungan misi. Dalam konteks karya misi di empat karesidenan, perspektif keterarahan ini layak dicermati. Pilihan para misionaris CM menjadikan Blitar sebagai pusat misi, misalnya, menjelaskan betapa kesadaran akan lingkungan misi dan keterarahan spesifik atas medan perutusan harus diaktualisasikan.

2.2.1 Vikariat Apostolik Batavia: Cikal Bakal Misi

Pada 1807, ketika Louis Napoleon menjadi Raja Belanda, Paus Pius VII mengajukan pembagian wilayah Belanda di luar Eropa ke dalam tiga prefektur dan disetujui. Salah satu di antaranya adalah Prefektur Apostolik Batavia di Hindia Belanda, dipisahkan dari Prefektur Apostolik Kepulauan Samudra Hindia. Sebagai Prefek Apostolik ditunjuk R.D. Jacobus Nelissen. Ia tiba di Batavia dan diinstalasi sebagai Prefek Apostolik pada 4 April 1808. Pada tahun 1817 R.D. Nelissen wafat,

digantikan oleh R.D. Lambertus Prinsen, yang bertugas sampai tahun 1830.²¹

Tahun 1842 Paus Gregorius XVI menaikkan status Prefektur Apostolik Batavia menjadi Vikariat Apostolik. Mgr. Jacobus Groof ditunjuk sebagai Vikaris Apostolik (1842-1852).²² Penerusnya Mgr. Petrus Maria Vrancken (1852-1874) yang sudah bertugas sebagai coadjutor dari tahun 1847,²³ lalu Mgr. Adam Carel Claessens (1874-1893). Pada masa Mgr. Claessens penyebaran dan perkembangan agama Katolik terjadi cukup pesat di beberapa wilayah di Jawa seperti Bogor, Cirebon, Magelang, Madiun, Malang.²⁴

Sebenarnya, Mgr. Vrancken sudah memberi perhatian pada pengembangan iman penduduk setempat. Ini terbukti dari adanya penerima Sakramen Krisma di Batavia pada tahun 1850 dari kalangan Melayu, Cina, Afrika, dan seorang pemuda Papua, bukan hanya orang Eropa seperti Belanda, Belgia, Perancis, Jerman, dan Portugis.²⁵

Mgr. Vrancken menghadirkan para misionaris Ursulin tahun 1855.²⁶ Ia mendirikan panti asuhan St. Vincentius di Batavia pada 1855. Pendirian seminari bagi pengembangan misi untuk penduduk setempat ia pikirkan. Ia bicara tentang kesulitan dalam pewartaan iman Katolik di kalangan suku Jawa.²⁷ Di awal masa tugasnya, ia menginginkan kehadiran para Jesuit, mengingat imam diosesan Belanda semakin sedikit. Ketika Rm. Martinus van den Elzen SJ dan Rm. Joannes Baptista Palinckx tiba di Batavia pada 9 Juli 1859 ia berharap para Jesuit lainnya menyusul “membawa hormat dan kemuliaan yang lebih besar bagi Allah di kebun anggur yang amat luas ini”.²⁸

Dengan kedatangan para Jesuit secara terus-menerus, maka dalam waktu singkat karya misi

dapat diserahkan kepada mereka. Setelah Mgr. Claessens, pengganti Mgr Vrancken, mengundurkan diri tahun 1893, sebagai penggantinya ditunjuk Mgr. Walterus Sybradus Staal SJ, yang begitu ditahbiskan sebagai imam 1 September 1872 langsung bertugas di Padang, kemudian di Batavia.²⁹

Penggantinya adalah Mgr. Edmundus Sybradus Luypen SJ. Ia seorang imam diosesan Keuskupan Breda yang ditahbiskan pada 7 Juni 1879, dan masuk SJ pada 1883. Ia mulai berkarya di Hindia Belanda pada tahun 1889, dan ditunjuk sebagai Vikaris Apostolik Batavia pada tahun 1898.³⁰

2.2.2 Vikariat Apostolik Batavia: Peletak Dasar Misi

Karya misi Jawa sendiri sudah dimulai oleh Rm. Franciscus Georgius Josephus van Lith SJ di Muntilan sejak 1897, setahun sebelum Mgr. Luypen SJ menjabat Vikaris Apostolik Batavia. Karya ini kelak menjadi inspirasi bagi para misionaris CM yang berkarya di daerah timur pulau Jawa, di Surabaya dan sekitarnya. Setelah tiba di Batavia dan menuju Surabaya untuk memulai misi pada 1923, mereka sempat mampir ke Muntilan untuk menyaksikan karya misi yang berjalan baik, dan dapat menjadi model bagi karya mereka di Surabaya.³¹

Kepemimpinan Mgr. Luypen SJ menunjukkan arah baru kehadiran Gereja Katolik di Hindia Belanda, melalui pembagian wilayah misi. Arah baru ini menegaskan bahwa bahwa misi adalah prioritas, dan untuk mewujudkan hal itu secara konkret berbagai tarekat imam dilibatkan, dengan pemberian tanggung jawab atas porsi teritorial tertentu yang dibagikan kepada tarekat itu.

²¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Jacobus_Nelissen
https://id.wikipedia.org/wiki/Keuskupan_Agung_Jakarta

²² ALBERT BATTANDIER, “Vicariate Apostolic of Batavia”, dalam *Catholic Encyclopedia* (1913).
[https://en.wikisource.org/wiki/Catholic_Encyclopedia_\(1913\)/Vicariate_Apostolic_of_Batavia](https://en.wikisource.org/wiki/Catholic_Encyclopedia_(1913)/Vicariate_Apostolic_of_Batavia)

²³ https://id.wikipedia.org/wiki/Petrus_Maria_Vrancken

²⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Adam_Carel_Claessens

²⁵ Huub J.W.M. Boelaars, *Indonesianisasi. Dari Gereja Katolik di Indonesia Menjadi Gereja Katolik Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 77 dalam Petrus

Canisius Edi Laksito, “Sejarah Pastoral Keuskupan Surabaya: 1850-1942”, *JPAK* 21 (2), 2021, 98-99.

²⁶ <https://ursulinindonesia.or.id/sejarah-ursulin>

²⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Petrus_Maria_Vrancken

²⁸ <https://jesuits.id/nusantara-misi-sj-belanda/>.

²⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Walterus_Staal

³⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Edmundus_Luypen

³¹ Petrus Canisius Edi Laksito, *Mendidik Anak Bangsa. Geliat dan Pasang Surut 80 Tahun Yayasan Yohanes Gabriel Menjadi Indonesia*, (Surabaya, Yayasan Yohannes Gabriel, 2005), 51

Pada tanggal 22 Desember 1902 didirikan Prefektur Apostolik Nugini Belanda, diserahkan kepada tarekat MSC. Secara berturut-turut menyusul pada 11 Februari 1905 didirikan Prefektur Apostolik Borneo Belanda, diserahkan kepada tarekat OFM Cap., tanggal 30 Juni 1911 didirikan Prefektur Apostolik Sumatra dan diserahkan kepada OFM Cap., pada 16 September 1913 didirikan Prefektur Apostolik Kepulauan Sunda Kecil (kecuali Flores) dan diserahkan kepada SVD, pada 20 Juli 1914 didirikan Prefektur Apostolik Kepulauan Sunda Kecil (Flores) dan diserahkan kepada SVD, pada 19 November 1919 didirikan Prefektur Apostolik Sulawesi, diserahkan kepada tarekat MSC. Dengan pembagian ini, maka panggung teritorial misi di luar Jawa sudah dibagikan seluruhnya.³²

Vikariat Apostolik Batavia masih menjadi tanggung jawab Jesuit, kini hanya meliputi Jawa dan Madura. Mgr. Luypen SJ sendiri wafat pada tanggal 1 Mei 1923, tanpa sempat menjemput para misionaris CM dan OCarm., yang baru tiba di Batavia 30 Juni 1923. Mereka tiba di tempat misi di Surabaya dan Malang pada tanggal 6 Juli 1923.³³

Pembagian wilayah misi di pulau Jawa dan Madura baru terlaksana pada masa penggantinya, Mgr. Anton Pieter Franz van Velsen SJ, yang mulai bertugas pada 21 Januari 1924. Pada masa kepemimpinannya didirikan Prefektur Apostolik Malang pada 27 April 1927 di bawah tanggung jawab Ordo Karmel. Prefektur Apostolik Surabaya berdiri 15 Februari 1928 di bawah tanggung jawab CM. Prefektur Apostolik Bandung pada 20 April 1932 di bawah tanggung jawab OSC. Prefektur Apostolik Purwokerto tanggal 25 April 1932 di bawah MSC. Setelah sebagian besar pulau Jawa diserahkan kepada tarekat-tarekat ini, Mgr. van Velsen SJ mengundurkan diri. Ia mengakhiri tugas pada Maret 1933.³⁴

Pembagian wilayah gerejawi di Jawa selanjutnya terjadi tanggal 25 Juni 1940,

didirikan Vikariat Apostolik Semarang. Wilayah ini tetap menjadi tanggung jawab SJ, tetapi pendirian Vikariat Apostolik disertai terobosan, karena uskup yang ditunjuk adalah Mgr. Albertus Soegijapranata SJ, penduduk setempat. Pembagian terakhir terjadi pada 9 Desember 1948 melalui pendirian Prefektur Apostolik Sukabumi, yang kelak menjadi Keuskupan Bogor.³⁵

Dengan semua pembagian ini, terciptalah panggung teritorial misi di seluruh Hindia Belanda yang disiapkan bagi Gereja-gereja partikular baru masa depan. Sidang pertama para pemimpin Gereja-gereja lokal di Jakarta 15-16 Mei 1924 ditandai sebagai berdirinya Konferensi Waligereja Indonesia, yang mengungkapkan niat untuk mewujudkan gerak misi bersama. Sidang pertama ini disusul dengan sidang kedua pada 31 Agustus sampai 6 September 1925, dipimpin oleh Mgr. B.Y. Gijlswijk, OP, Delegatus Apostolik di Afrika Selatan sebagai utusan Paus Pius X. Sidang dihadiri para pimpinan Gereja-gereja lokal yang telah terbentuk, termasuk Rm. Theophilus de Backere, CM, superior misi di Surabaya, yang kelak menjadi Prefek Apostolik Surabaya pada 1928.³⁶

2.2.3 Kehadiran Karya Misi di Wilayah Surabaya

Para misionaris CM pertama, Rm. Th. De Backere CM, Rm. E.E. Sarneel CM, Rm. J.H. Wolters CM, Rm. Th. Heuvelmans CM, dan Rm. C.A. Clamers CM, tiba di Surabaya pada 1923. Wilayah Karesidenan Surabaya, Kediri, dan Rembang, yang semula ditangani oleh para romo SJ, diserahkan kepada mereka. Sebelum mencapai Surabaya, mereka sempat melihat karya misi yang sudah berjalan di Batavia, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan Muntilan. Kekaguman berpuncak di Muntilan, kota kecil. Sekitar 1.000 anak Jawa belajar di pendidikan tingkat dasar dan menengah,

³² <https://www.catholic-hierarchy.org/diocese/djaka.html>

³³ <https://keuskupansurabaya.org/page/mgr-dr-theophilus-de-backere-parare-vias-domini-me/>; Laksito, *Mendidik*, 60; <https://www.ocarm.org/en/item/6554-elective-chapter-of-the-indonesian-province-held>

³⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Keuskupan_Agung_Jakarta

³⁵ <https://www.catholic-hierarchy.org/diocese/djaka.html>

³⁶ <https://www.kawali.org/profil-kwi/>

termasuk beberapa calon imam pribumi. Visi tentang Muntilan ini mereka bawa ketika tiba di Surabaya.³⁷

Setelah kedatangan 5 misionaris awal, hampir setiap tahun ada tambahan dari Belanda. Pada 1924 datang 3 orang, 1925 datang 2 orang, 1926 datang 3 orang, 1927 datang 2 orang, 1928 datang 1 orang, 1930 datang 2 orang, 1931 datang 1 orang, 1932 datang 3 orang, 1933 datang 2 orang, 1934 datang 2 orang, 1935 datang 3 orang, 1936 datang 2 orang, 1937 datang 4 orang, 1938 datang 3 orang, dan 1939 datang 1 orang. Karena Perang Dunia II telah pecah dan Belanda diduduki oleh tentara Nazi, setelah 1939 tak ada tenaga baru. Secara keseluruhan telah datang 39 misionaris CM. Jumlah ini masih harus dikurangi dengan 2 orang meninggal, dan 1 orang kembali ke Belanda karena sakit, yaitu Mgr. de Backere sendiri.³⁸

Pada 1928, lima tahun setelah kedatangan misionaris pertama, dibentuk Prefektur Apostolik Surabaya oleh Kongregasi *de Propaganda Fide*. Rm. de Backere CM ditunjuk sebagai Prefek. Ia memilih motto kegemalaan *Parare vias Domini*, Mempersiapkan jalan Tuhan. Saat pembentukan Prefektur Apostolik, wilayah Karesidenan Madiun, yang semula ditangani oleh romo Yesuit, digabungkan ke Prefektur, sehingga wilayahnya kini meliputi Karesidenan Surabaya, Kediri, Rembang, Madiun.³⁹

Pada 1928, di seluruh Prefektur telah terdapat 5 paroki: yaitu Kelahiran St. Perawan Maria dan Hati Kudus Yesus di Surabaya, St. Vincentius a Paulo di Kediri, St. Yusuf di Blitar, dan St. Cornelius di Madiun. Saat digabungkan ke wilayah Prefektur Apostolik Surabaya, Paroki St. Cornelius Madiun sudah berusia 31 tahun. Sudah ada gereja, pastoran, dan sekolah.

Pertambahan paroki baru terjadi pada 1932, yaitu Paroki St. Willibrordus Cepu. Lalu menyusul Paroki St. Yosef Mojokerto pada

tahun 1933, dan Paroki Kristus Raja Surabaya pada 1936.⁴⁰

Bersama para romo CM, karya misi melibatkan kelompok religius dan awam. Di Surabaya terdapat para bruder Aloysius (CSA) yang sudah ada sejak 1862, dan suster-suster Ursulin sejak 1863. Kemudian datang pula para suster SSp.S tahun 1925, suster PK tahun 1927, dan frater-frater BHK tahun 1939. Selain itu terdapat perkumpulan awam ibu-ibu Karya St. Melania, mulai berkarya 1924. Di luar Surabaya terdapat beberapa kehadiran misi. Di Pacet sejak 1930 hadir suster Ursulin, dan di Blitar sejak 1928 suster SSp.S. Di Madiun sendiri sudah terdapat suster Ursulin sejak 1914, dan bruder CSA sejak 1934. Di Madiun juga terdapat perkumpulan ibu-ibu Karya Melania sejak 1929. Selain membantu para romo CM di bidang pendampingan umat, biarawan-biarawati dan kelompok awam tersebut bekerja secara khusus di bidang pendidikan, kesehatan, panti asuhan, dan rumah retreat.⁴¹

2.2.4 Pola Perkembangan Misi

Para romo CM mengikuti model misi di Jawa Tengah. Mereka menjadikan karya pendidikan sebagai garis depan. Untuk itu pada 21 Oktober 1925 didirikan Yayasan Yohannes Gabriel (*Johannes Gabriel Stichting*). Ketuanya adalah *overste* atau pimpinan misi, Rm. de Backere CM. Di seluruh wilayah misi didirikan sekolah-sekolah untuk mendidik anak-anak setempat, sekaligus membuka jalan perjumpaan antara penduduk setempat dan iman Kristiani.⁴²

Sekolah misi pertama dibuka di Blitar, HIS Yohanes Gabriel, 1 Juli 1926, dengan guru dari Muntilan dan Mendut, serta guru berkebangsaan Belanda. Pada 1927 sekolah dilengkapi dengan asrama, dan pastoran didirikan.⁴³ Setelah itu di seluruh wilayah Blitar sekolah-sekolah didirikan. Sampai 1935 berdiri lebih dari 30 sekolah. Juga didirikan 4 *schoolkring*, yaitu kelompok umat atas dasar

³⁷ Laksito, *Mendidik*, 51

³⁸ Laksito, *Mendidik*, 76-77

³⁹ Laksito, *Mendidik*, 77.

⁴⁰ Laksito, *Mendidik*, 77-78.

⁴¹ Laksito, *Mendidik*, 78.

⁴² Laksito, *Mendidik*, 58-59.

⁴³ Laksito, *Mendidik*, 82.

teritorial yang membantu usaha sekolah di sekitarnya, masing-masing di Kota Blitar, Wlingi, Ngeni, dan Wonodadi.⁴⁴

Seiring perkembangan di bidang pendidikan, terbentuk komunitas umat. Ada baptisan baru dari antara anak-anak para guru atau umat yang sudah Katolik, maupun perlahan dari katekumen yang berminat menjadi Katolik. Setelah masa katekumenat, 30 Maret 1929 diadakan baptisan pertama 12 murid HIS, di antaranya kelak menjadi imam dan ditahbiskan sebagai Uskup Surabaya, yaitu Mgr. A.J. Dibjokarjono.⁴⁵

Selain pertambahan umat dari baptisan, perkembangan misi ditandai dengan terbentuknya kelompok umat seperti Triyasa (gabungan Perkumpulan Katulik Wandawa, Wanita Katulik, Perserikatan Politik Katulik Djawi), perkumpulan bea siswa (*studiefonds*), perkumpulan dana pembinaan umat (*retraitefonds*), perkumpulan simpan pinjam, kelompok kematian, konferensi guru desa, dan sebagainya.⁴⁶ Juga muncul Muda Katolik, Kongregasi Maria, Pandu Katolik, kelompok sepak bola, koor. Anggota berbagai kelompok bisa terdiri dari campuran Jawa, Cina dan Belanda.⁴⁷

Selain melalui sekolah yang juga menjadi tempat pelajaran agama serta komunitas-komunitas umat yang tersebar di sekitar sekolah, pertumbuhan umat dan kehadiran misi juga tampak dari adanya gereja-gereja yang didirikan. Pendirian gereja mulai dipikirkan setelah sekolah-sekolah dari berbagai jenis yang berjumlah lebih dari 30 buah, berdiri. Pada 18 Oktober 1931 Gereja St. Yusuf diberkati oleh Mgr. de Backere, CM. Pada tahun 1934, diberkati gereja di Gabru, Genjong, Ngeni, Sumberboto, dan Wonodadi. Dengan demikian sudah terdapat 6 gereja di wilayah Blitar.⁴⁸

Dari catatan tahun 1935, atau 10 tahun setelah kehadiran misi di Blitar dan berdirinya Yayasan Yohannes Gabriel pada 1925, terlihat bahwa misi mendapat bentuknya dari kehadiran berbagai unsur persekutuan Gereja.

Imam, suster, bruder, sekolah, asrama dan gurunya, kegiatan pelajaran agama yang berlanjut dengan baptisan, kegiatan pembinaan umat, termasuk kegiatan doa dan dana untuk mendukung karya misi, terbentuknya berbagai kelompok umat, baik yang bersifat kategorial maupun dalam bentuk *kring* atau kelompok umat teritorial menandakan adanya komunitas yang hidup, suatu persekutuan yang bertumbuh dari benih kecil menjadi lebih besar. Di tengah-tengah itu berdiri gereja-gereja induk dan stasi-stasi yang lebih kecil.

Di seluruh Blitar pada tahun 1935 tercatat 680 umat non-Eropa dan 740 umat Eropa atau total 1420 jiwa, dan pada 1939 tercatat 621 umat non-Eropa dan 548 umat Eropa atau total 1169 jiwa. Gambaran statistik ini menunjukkan mulai berhasilnya misi di wilayah ini.⁴⁹

Jika melihat tabel umat tahun 1938-1939, di seluruh Prefektur Apostolik Surabaya tercatat data sebagai berikut: Blitar, umat non-Eropa 496 dan Eropa 476 jiwa; Wlingi, umat non-Eropa 125 dan Eropa 72 jiwa; Kediri, umat non-Eropa 308 dan Eropa 572 jiwa; Puhsarang, umat non-Eropa 142, Eropa 40 jiwa; Pare, umat non-Eropa 59, Eropa 126 jiwa; Madiun, non-Eropa 505, Eropa 1.066 jiwa; Mojokerto, non-Eropa 119, Eropa 826 jiwa; Surabaya, non-Eropa 2.210, Eropa 10.700 jiwa; Cepu non-Eropa 237, Eropa 368 jiwa. Total non-Eropa 4.201, Eropa 14.246 jiwa. Dengan data-data di atas, maka total umat Prefektur Apostolik Surabaya 1938-1939 sebesar 18.447 jiwa.⁵⁰

Karena sakit, Mgr. de Backere CM pada 24 Desember 1936 kembali ke Belanda, dan tidak kembali ke tanah misi. Pada 22 Oktober 1937 Mgr. Michael Verhoeks CM ditunjuk sebagai Prefek Apostolik baru, dengan motto *Ut Omnes Unum Sint*, Agar Semua Menjadi Satu. Setiba di Surabaya ia diinstalasi sebagai Prefek 13 Maret 1938.⁵¹

Sebuah peta dimuat di buletin *De Katholieke Gids* milik Prefektur Apostolik Surabaya terbit 9 Maret 1941, memberi gambaran tentang

⁴⁴ Laksito, *Mendidik*, 85.

⁴⁵ Laksito, *Mendidik*, 84.

⁴⁶ Laksito, *Mendidik*, 84-85.

⁴⁷ Laksito, *Mendidik*, 86.

⁴⁸ Laksito, *Mendidik*, 84-85.

⁴⁹ Laksito, *Mendidik*, 89.

⁵⁰ Laksito, *Mendidik*, 89.

⁵¹ Laksito, *Mendidik*, 79-80.

kondisi misi saat itu. Datanya sebagai berikut:⁵²

1. *Kediaman misionaris imam*: Surabaya, Mojokerto, Kediri, Blitar, Wlingi, Madiun, Cepu;
2. *Gereja atau Kapel*: Sidoarjo, Pacet, Jombang, Kertosono, Plangkat, Kalinanas, Gayam, Pohsarang, Pare, Wonodadi, Pasiraman, Sumberboto, Ngeni, Jemblong, Gabru, Genjong, Ngawi, Tapelan;
3. *Daerah Kunjungan Rutin*: Krian, Gresik, Lamongan, Babat, Tuban, Bojonegoro, Jatirogo, Lasem, Rembang, Blora, Kedungtuban, Randublatung, Saradan, Tempursari, Ngrambe, Magetan, Sarangan, Ponorogo, Pacitan, Ngadirejo, Nganjuk, Jamban, Tulungagung, dan Trenggalek;
4. *Sekolah Katolik*: Surabaya 29, Sidoarjo 1, Krian 2, Mojokerto 1, Kertosono 1, Pare 3, Nganjuk 1, Plangkat 2, Kalinanas 3, Gayam 4, Pohsarang 1, Kediri 5, Jalur Kediri-Tulungagung dan sekitar 6, Jalur Djamban-Gabru 10, Wonodadi 4, sekitar Pasiraman 3, Blitar 2+12, sekitar Wlingi 4, Madiun 14+4, Tempursari 2, sekitar Magetan-Sarangan 6, Tapelan 1, Cepu (arah Ngawi) 1, dan Rembang 1.
5. *Komunitas Religius (Bruder atau Suster)*: Surabaya 6, Pacet 3, Kediri 2, Blitar 2, dan Madiun 2.

Di sini dapat dicatat aneka metode misi yang dikembangkan di seluruh wilayah ini. *Pertama*, metode sekolah, terutama di Blitar dan sekitarnya. Metode ini secara langsung mengangkat martabat manusia dan memperkenalkan Kristus kepada mereka *Kedua*, metode katekis, terutama di Madiun dan sekitarnya. *Ketiga*, metode kebudayaan dan kehidupan masyarakat bawah, di Kediri dan sekitarnya. Seni bangunan, patung, tembikar dan drama menjadi caraewartakan Kristus. *Keempat*, di Surabaya diupayakan evangelisasi ke masyarakat keturunan Cina, baik lewat sekolah maupun langsung ke masyarakat. Juga pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga diperhatikan.⁵³

Dari data terlihat kesan bahwa komunitas umat dibentuk di seluruh panggung teritorial misi dengan kepekaan terhadap kekhasan wilayah, baik secara geografis maupun demografis. Terdapat 35 imam yang tinggal di pusat-pusat misi di Surabaya, Mojokerto, Kediri, Blitar, Wlingi, Madiun, Cepu. Di sekitar pusat-pusat itu terdapat 18 gereja atau kapel. Selain itu, ada 24 daerah yang belum memiliki kapel atau gereja, namun mendapat jadwal kunjungan rutin. Selain itu tercatat 133 sekolah dikelola oleh imam, suster dan bruder, menjadi wujud nyata kehadiran misi di masyarakat. Data ini menjelaskan seberapa “jalan bagi misi” telah dibuka, dan betapa “panggung teritorial misi” sedang disiapkan untuk menjadi suatu Gereja lokal.

2.2.5 Pilihan dan Hasil Strategi Misi

Pada saat kedatangan ke wilayah misi, para misionaris mendapatkan tugas di Karesidenan Surabaya, Rembang, dan Kediri. Surabaya berperan sebagai rumah induk, sedangkan Karesidenan Rembang dan Karesidenan Kediri menjadi wilayah yang dijajaki, dengan visi untuk membuat suatu pusat misi seperti di Muntilan. Dari Surabaya, pos masuk ke Karesidenan Kediri adalah kota Kediri, sementara pos masuk ke Karesidenan Rembang adalah Cepu. Dari pengamatan diputuskan bahwa wilayah yang dipilih sebagai pusat misi masa depan adalah Blitar. Di titik ini dan dari langkah selanjutnya, terlihat bahwa pilihan kewilayahan ini menentukan perkembangan selanjutnya.

Pada masa Prefektur Apostolik, perkembangan di Karesidenan Kediri terjadi di dua area. Pertama di Blitar dan sekitarnya sebagai pusat misi, dan kedua di Kediri dan sekitarnya yang juga berkembang sebagai pusat misi dengan adanya gereja di Pohsarang. Tapi di Karesidenan Rembang misi terhenti di Cepu. Tidak ada pengembangan lebih lanjut ke area lebih jauh, misalnya ke Blora, Rembang, Tuban atau Bojonegoro. Sementara, Karesidenan Madiun yang digabungkan ke dalam Prefektur, maupun Karesidenan Surabaya sendiri, sudah lebih dulu

⁵² Laksito, *Mendidik*, 72-74.

⁵³ Laksito, *Mendidik*, 82.

berkembang, dan terus dikembangkan. Dengan pola ini, maka selama masa Prefektur Apostolik yang berkembang mencolok selain daerah Karesidenan Surabaya adalah daerah Karesidenan Kediri, kemudian Madiun.

Jika melihat data umat pada 1938-1939, di wilayah seluruh Prefektur terdapat 4.201 umat non-Eropa. Jumlah itu tersebar di Karesidenan Rembang 237 jiwa (Cepu 237) atau sebesar 5,64%, Karesidenan Madiun 505 jiwa (Madiun 505) atau sebesar 12,02%, Karesidenan Kediri 1.130 jiwa (Blitar 496, Wlingi 125, Kediri 308, Pohsarang 142, Pare 59) atau sebesar 26,90%, dan Karesidenan Surabaya 2.329 jiwa (Mojokerto 119, Surabaya 2.210) atau sebesar 55,44%.

Kategori umat non-Eropa ini dipilih untuk lebih menunjukkan sasaran misi, bisa orang Jawa, Chinese, atau dari wilayah Nusantara yang lain. Terlihat bahwa perkembangan paling mencolok terjadi di Karesidenan Surabaya sebesar 55,44%, lalu Karesidenan Kediri sebesar 26,90%. Karesidenan Madiun belasan persen, masih cukup signifikan. Tapi Karesidenan Rembang hanya 5,64%, jumlah paling sedikit.

Dari sisi kehadiran imam, dari 35 orang yang datang dari Belanda sampai 1939, Cepu baru pada 1937 mendapatkan 2 orang imam. Sebelumnya selalu hanya ada 1 imam.⁵⁴ Kediri mendapat 2 tenaga imam sejak 1924, Blitar 2 imam sejak 1927, sementara Cepu baru mendapat 1 imam pada 1932.⁵⁵

Untuk melihat secara lebih rinci kediaman misionaris imam di pastoran sampai sebelum kedatangan Jepang, Buku Tahun 1942 bisa dirujuk. Di situ tercatat data sebagai berikut. Total ada 31 imam, termasuk Mgr. Verhoeks CM. Karesidenan Rembang 2 imam (Cepu 2) atau sebesar 6,45%, Karesidenan Madiun 4 imam (Madiun 4) atau sebesar 12,9%, Karesidenan Kediri 8 imam (Blitar 3, Wlingi 1, Kediri 2, Pohsarang 1, Pare 1) atau sebesar 25,81%, dan Karesidenan Surabaya 17 imam (Mojokerto 1, Kepanjen 5, Darmo 4, Ketabang

4, Widodaren 2, Gereja Pelabuhan 1) atau sebesar 54,84%.⁵⁶

Rupanya persentase kehadiran imam di wilayah Karesidenan kurang lebih berbanding lurus dengan jumlah umat non-Eropa yang terdata sebagai warga Gereja. Jumlah imam terbesar di Karesidenan Surabaya sebesar 54,84%, disusul Karesidenan Kediri sebesar 25,81%. Karesidenan Madiun belasan persen, dan persentase paling kecil Karesidenan Rembang, 6,45%.

Dari *De Katholieke Gids* 9 Maret 1941 terdapat data kehadiran komunitas religius bruder atau suster berikut. Karesidenan Rembang tidak ada atau sebesar 0%, Karesidenan Madiun 2 komunitas atau sebesar 13,33%, Karesidenan Kediri 4 komunitas (Kediri 2, Blitar 2) atau sebesar 26,67%, dan Karesidenan Surabaya 9 komunitas (Surabaya 6, Pacet 3) atau sebesar 60%.⁵⁷

Di sini terlihat lebih jauh adanya kesejajaran antara persentase umat non-Eropa sebagai buah misi, serta kehadiran imam dan komunitas religius sebagai tenaga yang ambil bagian dalam karya misi. Di Karesidenan Rembang jumlah umat non-Eropa 5,64%, imam di pastoran 6,45%, dan komunitas religius 0%. Di Karesidenan Madiun jumlah umat non-Eropa 12,02%, imam di pastoran 12,9%, dan komunitas religius 13,33%. Di Karesidenan Kediri jumlah umat non-Eropa 26,9%, imam di pastoran 25,81%, dan komunitas religius 26,67%. Terakhir di Karesidenan Surabaya jumlah umat non-Eropa sebesar 55,44%, imam di pastoran 54,84%, dan komunitas religius 60%. Jika diandaikan bahwa jumlah umat non-Eropa adalah buah dari karya misi, barangkali bisa dikatakan bahwa pada masa Prefektur Apostolik, besaran jumlah tenaga misi (imam dan religius) berdampak pada besaran jumlah umat yang dihasilkan dari karya misi.

Data lain yang relevan dengan perkembangan umat adalah kehadiran karya pendidikan. Berikut data kehadiran sekolah Katolik dari *De Katholieke Gids* 9 Maret 1941. Total terdapat 123 sekolah dari aneka jenis dan

⁵⁴ Laksito, *Mendidik*, 92.

⁵⁵ Laksito, *Mendidik*, 91.

⁵⁶ John Tondowodjojo, *Sejarah Perkembangan Keuskupan Surabaya*. Jilid I (Surabaya: Yayasan Sanggar Bina Tama, 2000), 263-281.

⁵⁷ Laksito, *Mendidik*, 72-74.

ukuran. Karesidenan Rembang 3 sekolah (di Tapelan 1, Cepu arah Ngawi 1, Rembang 1) atau 2,44%, Karesidenan Madiun 26 sekolah (di Madiun 14+4, Tempursari 2, sekitar Magetan-Sarangan 6) atau 21,14%, Karesidenan Kediri 61 sekolah (di Kertosono 1, Pare 3, Nganjuk 1, Plangkat 2, Kalinanas 3, Gayam 4, Pohsarang 1, Kediri 5, Jalur Kediri-Tulungagung dan sekitar 6, Jalur Djambean-Gabru 10, Wonodadi 4, sekitar Pasiraman 3, Blitar 2+12, sekitar Wlingi 4) atau 49,59%, dan Karesidenan Surabaya 33 sekolah (di Surabaya 29, Sidoarjo 1, Krian 2, Mojokerto 1) atau 26,83%.⁵⁸

Dari data ini terlihat bahwa kehadiran sekolah juga terkait dengan perkembangan umat. Paling menonjol adalah data di Karesidenan Rembang yang hanya dengan 3 sekolah atau 2,44%, maka sebanding dengan jumlah umat non-Eropa sebanyak 237 jiwa atau 5,64%. Sedangkan jumlah sekolah terbesar ada di Karesidenan Kediri yakni 61 sekolah atau 49,59% meliputi hampir separuh dari seluruh jumlah sekolah, sementara jumlah umat non-Eropa 1.130 jiwa atau sebanyak 26,9%.

Meskipun persentase jumlah umat tidak mendekati persentase jumlah sekolah, namun kehadiran banyak sekolah kiranya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah umat non-Eropa di Karesidenan ini. Demikian pula dengan data sekolah di Karesidenan Madiun sebesar 21,14% sedangkan jumlah umat non-Eropa sebanyak 12,02% tentu masih terdapat selisih yang tidak sedikit. Rupanya di sini dapat dicatat bahwa meski kehadiran sekolah memiliki pengaruh pada jumlah umat non-Eropa, tetapi tidak dalam suatu hubungan yang langsung atau otomatis, karena masih ada perbedaan yang tidak kecil antara jumlah sekolah dengan jumlah umat yang masuk dalam Gereja Katolik.

Namun di Karesidenan Surabaya jumlah sekolah sebesar 26,83%, tidak sebanyak di Karesidenan Kediri yang berjumlah 49,59%, bahkan hampir sama dengan jumlah sekolah di Karesidenan Madiun yaitu 21,14%. Meski demikian jumlah umat di Karesidenan Surabaya lebih dari setengah jumlah

keseluruhan umat di Prefektur Apostolik yaitu 55,44%. Di sini kiranya perlu didalami lebih lanjut adanya faktor-faktor lain yang membedakan. Salah satu yang mungkin adalah kapasitas sekolah di Surabaya yang lebih besar daripada sekolah di luar Surabaya, sehingga meskipun terdapat lebih sedikit sekolah tetapi umat yang diterima lebih banyak.

Selanjutnya data lain yang dapat dicatat adalah kehadiran misi melalui keberadaan gereja atau kapel di luar pusat-pusat misi di pusat karesidenan. Selain itu juga data kunjungan imam ke daerah yang jauh dari pusat misi dan belum ada kapel atau gereja. Tentunya di daerah kunjungan ini kegiatan pastoral atau sakramental dilakukan di rumah umat atau di fasilitas umum yang dapat atau diizinkan untuk dipakai.

Jika melihat keberadaan gereja dan kapel di luar pusat-pusat misi yang memiliki pastoran di atas, berdasarkan *De Katholieke Gids* 9 Maret 1941, tercatat data berikut. Karesidenan Rembang 1 kapel (Tapelan), Karesidenan Madiun 1 kapel (Ngawi), Karesidenan Kediri 13 kapel/gereja (Kertosono, Plangkat, Kalinanas, Gayam, Pohsarang, Pare, Wonodadi, Pasiraman, Sumberboto, Ngeni, Jemblong, Gabru, Genjong) dan Karesidenan Surabaya 3 kapel/gereja (Sidoarjo, Pacet, Jombang).⁵⁹

Dari segi “daerah kunjungan rutin” (stasi tanpa kapel atau gereja), berdasarkan *De Katholieke Gids* 9 Maret 1941, terdapat data berikut. Karesidenan Rembang 10 daerah (Lamongan, Babat, Tuban, Bojonegoro, Jatirogo, Lasem, Rembang, Blera, Kedungtuban, Randublatung), Karesidenan Madiun 7 daerah (Saradan, Tempursari, Ngrambe, Magetan, Sarangan, Ponorogo, Pacitan), Karesidenan Kediri 5 daerah (Ngadirejo, Nganjuk, Jamban, Tulungagung, Trenggalek), dan Karesidenan Surabaya 2 daerah (Krian, Gresik).⁶⁰

Lagi-lagi di sini dapat diamati bahwa keberadaan karya misi dari segi adanya gereja atau kapel di Karesidenan Rembang terlihat tidak signifikan. Selain 1 gereja di Cepu, hanya terdapat 1 kapel di Tapelan. Sekurangnya

⁵⁸ Laksito, *Mendidik*, 72-74.

⁵⁹ Laksito, *Mendidik*, 72-74.

⁶⁰ Laksito, *Mendidik*, 72-74.

kurangnya secara fisik kehadiran tersebut tidak signifikan. Namun jika melihat jumlah tempat yang tidak memiliki kapel atau gereja tetapi dikunjungi imam jumlah terbesar ada di Karesidenan Rembang yaitu 10 tempat. Ini bermakna bahwa meskipun kehadiran misi di sini jumlahnya sedikit ditinjau dari kehadiran imam, komunitas religius dan sekolah, namun misionaris yang ditempatkan di Karesidenan Rembang tetap bekerja giat melaksanakan karya misi dengan sumber daya yang ada.

Selanjutnya jika ditarik secara umum gambaran kehadiran misi selama masa Prefektur Apostolik di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan perkembangan di kawasan-kawasan misi. Sepanjang periode misi terlihat bahwa Cepu, sebagai pintu masuk dari Surabaya ke wilayah Karesidenan Rembang tidak mengalami perkembangan berarti seperti di Karesidenan Kediri, yang meliputi daerah Blitar dan Kediri, dengan Kediri sebagai pintu masuk. Dengan catatan, dari segi transportasi, baik dari Surabaya ke Kediri lanjut Blitar maupun Surabaya ke Cepu lanjut Blora sampai Rembang rupanya tidak ada hambatan berarti, karena sudah ada jalur kereta api yang terbangun sejak awal Abad ke-20.

Perkembangan terbesar terjadi di Karesidenan Surabaya, lalu Karesidenan Kediri, kemudian Karesidenan Madiun. Karesidenan Rembang berada pada posisi terakhir. Hal ini memberi gambaran betapa strategi yang dipilih oleh para misionaris memberi hasil yang terlihat nyata. Namun di sisi lain strategi ini masih menyisakan keprihatinan karena selama masa Prefektur Apostolik ada kawasan misi yang belum cukup berkembang. Merupakan tugas bagi kelanjutan misi masa depan.⁶¹

2.3 Keuskupan dan Strategi Pastoral Teritorial Kevikepan

Peletakan dasar misi di wilayah Keuskupan Surabaya terjadi pada masa pra-Prefektur

Apostolik selama 5 tahun (1923-1928) dan masa Prefektur Apostolik (1928-1942) selama hampir 15 tahun. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa dari segi upaya misi, dua periode ini mempunyai ciri-ciri yang sama dan berlangsung dalam suatu keberlanjutan saja. Dari kondisi nol sampai pada terbentuknya kelompok kecil umat yang tersebar di seluruh wilayah Prefektur. Suatu masa yang bisa dikatakan singkat namun merupakan masa peletakan dasar kehidupan jemaat yang penuh berkat.

Masa lima tahun pertama diawali dengan orientasi kewilayahan dan penetapan strategi kewilayahan berfokus pada Karesidenan Kediri, khususnya Blitar, dan Surabaya, serta pendirian Yayasan Yohannes Gabriel dan sekolah-sekolahnya. Misi terus diperkuat dengan penambahan imam misionaris baru yang datang setiap tahun.

Setelah wilayah ini ditetapkan sebagai Prefektur Apostolik, praktis yang terjadi adalah pelaksanaan strategis yang ditetapkan dalam langkah-langkah lebih konkret hingga misi menampakkan hasil nyata dalam bentuk kehadiran umat dan sarana pertumbuhan setempat. Upaya ini berjalan lancar meski ada tantangan, misalnya di bidang keuangan, yang menyebabkan Mgr. de Backere CM sakit dan harus kembali ke Belanda.⁶²

Semua upaya misi yang berjalan relatif lancar mengalami guncangan hebat pada masa Vikariat Apostolik, khususnya pada tahun-tahun awal karena terjadi peralihan kekuasaan. Sejak 1942 pasukan Jepang datang, misionaris diasramakan di penjara Surabaya, dan kemudian di Jawa Barat. Mereka dilepaskan setelah Jepang menyerah dari Sekutu pada 1945. Namun karena konflik Indonesia sebagai negara yang baru didirikan dengan Belanda, kehidupan normal di Vikariat Apostolik baru bisa berlangsung pada 1950, setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia.

Kehancuran berat dalam bidang infrastruktur gerejawi dan sedikitnya tenaga misi menjadi tantangan utama periode awal

61

<https://www.indonesiarailwaymap.com/2016/07/jalur-kereta-api-niskai-cepu-surabaya.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_Cepu_Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Jalur_kereta_api_Gundih%E2%80%93Surabaya_Pasarturi

⁶² Laksito, *Mendidik*, 79.

Vikariat. Tetapi umat tetap bersemangat dan berperan besar menjaga persekutuan yang sudah ada selama pendudukan Jepang dan selama perang kemerdekaan. Selanjutnya umat juga ikut serta membangun kembali karya misi setelah masa damai tiba pada 1950.

Namun masa damai ini diwarnai ketegangan, bukan hanya karena politik dalam negeri yang diwarnai persaingan aliran-aliran politik, tetapi dari sisi misi terutama disebabkan karena konflik tentang Irian Barat yang belum selesai dengan Belanda. Konflik ini berakibat pada seretnya tambahan tenaga imam dari Belanda. Solusi atas masalah ini menjadi perjuangan Mgr. Johannes Klooster CM, yang bertugas menggantikan Mgr. Verhoeks CM yang wafat pada 1952.

Dari pemulihan misi menuju pada pendirian Keuskupan tahun 1961 dan pengembangan komunitas Kristiani pada masa Mgr. Klooster, perjalanan beralih pada kepemimpinan Mgr. Aloysius Josef Dibjokarjono, uskup yang dihasilkan dari misi. Pada masa inilah dimulai pembagian wilayah Keuskupan ke dalam tiga kevikapan. Setelah itu, Mgr. Yohanes Hadiwikarta mengembangkan menjadi 4 kevikapan, dan Mgr. Vincentius Sutikno Wisaksono menjadi 7 dan kemudian 8 kevikapan teritorial. Selain kevikapan teritorial, juga dibentuk kevikapan religius sejak masa Mgr. Hadiwikarta, dan pada masa Mgr. Sutikno selain kevikapan religius juga ditambahkan kevikapan kategorial.

Di antara hal-hal di atas perlu diselipkan kisah perkembangan baru di Karesidenan Rembang sebagai panggung teritorial misi, yang terjadi pada masa kepemimpinan Mgr. Klooster. Perubahan yang signifikan berlangsung di Karesidenan ini setelah diperoleh bantuan tenaga dari CM Provinsi Roma, Italia sejak kedatangan 2 misionaris pertama di Surabaya pada 1964. Namun, perkembangan daerah Karesidenan Rembang sendiri sebenarnya sudah dimulai sejak awal kepemimpinan Mgr. Klooster ketika ia menugasi imam untuk membuka paroki di Rembang pada 1953. Perkembangan lanjut membuat paroki di Karesidenan ini pada

tingkat tertentu dapat berjalan sejajar dengan semua paroki di karesidenan-karesidenan lain.

2.3.1 Masa Vikariat Apostolik: Keprihatinan dan Pemulihan Misi

Pada 4 Maret 1942 tentara Jepang mendarat di Surabaya.⁶³ Sebelum itu, pada 16 Oktober 1941 Paus Pius XII meningkatkan Prefektur Apostolik Surabaya menjadi Vikariat Apostolik Surabaya. Pada Pesta St. Mikael Malaikat Agung 8 Mei 1942, dalam suasana pendudukan Jepang, Mgr. Verhoeks CM ditahbiskan menjadi uskup oleh Mgr. A. Soegijapranata SJ.⁶⁴

Kedatangan pasukan Jepang membuat semua karya misi bubar, aset disita atau dibagi-bagikan. Ruang gerak misionaris dipersempit, upacara Gereja boleh berbahasa Latin, tapi khotbah berbahasa Belanda dilarang. Setelah beberapa saat boleh berkegiatan, akhirnya para misionaris, bersama orang-orang Belanda lain, ditahan. Dari September 1943 sampai Januari 1944 Mgr. Verhoeks dan para imam dari Mojokerto, Pare, Kediri, Blitar, Cepu, Madiun, bersama para misionaris dan orang-orang Belanda lain ditahan di penjara Bubutan. Setelah itu mereka dibawa ke kamp konsentrasi di Bandung dan Cimahi. Mereka baru kembali kelak September 1945, setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Namun pendudukan Jepang dan perang kemerdekaan yang menyusul kemudian telah mengubah situasi menjadi berbeda sama sekali, misi tidak bisa dikembalikan seperti semula. Harus ada upaya-upaya baru yang tidak bisa hanya mengandalkan apa yang sudah dibuat di masa lalu.⁶⁵

Selama Revolusi Kemerdekaan karya para misionaris belum bisa pulih karena Madiun, Kediri dan Blitar belum bisa dimasuki. Ada 18 imam Belanda termasuk Mgr. Verhoeks CM tinggal di Surabaya. Hanya ada 1 imam Belanda di Blitar dan 2 di Madiun. Selebihnya 3 imam Jawa: Rm. Dibjokarjono, Rm. Hadisoedarso, dan Rm. Dwidjoesastro CM, yang oleh Mgr. Verhoeks CM ditunjuk sebagai delegatus di daerah Republik.⁶⁶ Sebagai ganti

⁶³ Laksito, *Mendidik*, 126.

⁶⁴ Laksito, *Mendidik*, 81.

⁶⁵ Laksito, *Mendidik*, 127, 150-152.

⁶⁶ Laksito, *Mendidik*, 164.

sejumlah misionaris yang kembali ke Belanda, pada 1947-1948 datang 8 misionaris baru di Surabaya.⁶⁷ Pada masa ini berdiri Seminari Menengah St. Vincentius a Paulo di Surabaya pada 29 Juni 1948⁶⁸

Di awal pemulihan misi setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949, Mgr. Verhoeks CM meninggal dunia pada 8 Mei 1952. Sebagai pengganti ditunjuk Mgr. Johannes Klooster CM, yang ditahbiskan sebagai uskup 1 Mei 1953.⁶⁹

Persoalan penting yang dihadapi oleh Mgr. Klooster CM adalah jumlah imam. Selain untuk mengisi pos-pos lama, juga untuk pos-pos baru karena perkembangan umat dan karya. Nyatanya, setelah Perang Dunia II hanya ada 18 misionaris Belanda yang tinggal di Vikariat Apostolik Surabaya. Dari 1947-1956 datang 25 orang dari Belanda. Tapi karena konflik Indonesia-Belanda, setelah 1957 tidak mungkin mendapatkan imam dari Belanda. Tahbisan imam Projo hanya 2 orang, sedangkan tahbisan imam CM Indonesia baru mulai pada 1957.

Di semua paroki didirikan sekolah dari aneka jenjang. Didirikan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan Madiun serta Akademi Kateketik Widya Yuwana yang mendidik katekis profesional bagi Keuskupan dan paroki. Juga berkembang karya kesehatan dan pembinaan keluarga serta karya sosial.⁷⁰

Perkembangan umat dan karya di seluruh Keuskupan terjadi baik karena karya imam, peran serta awam, maupun keterlibatan religius. Selain para suster Ursulin, PK, SSp.S yang lebih dahulu hadir, juga ada suster-suster SPM, MC, CB, SND dan AK.⁷¹

2.3.2 Pendirian Keuskupan dan Pengembangan Komunitas Kristiani

Selama kepemimpinan Mgr. Klooster CM karya misi yang mengalami kehancuran selama pendudukan Jepang dipulihkan, dan dikembangkan lebih jauh. Secara gerejawi,

didirikan hirarki Gereja Indonesia pada 3 Januari 1961, dan Vikariat Apostolik Surabaya menjadi Keuskupan Surabaya.⁷²

Dalam situasi keprihatinan misi dan pemulihan itu, Mgr. Klooster CM mendapatkan bantuan imam dari Italia. Pada 1963 seorang imam projo, Rm. F. Lugano, bergabung dan bekerja di daerah Blitar. Di sela-sela persidangan Konsili Vatikan II pada 1962-1965, permintaan bantuan imam dari CM Provinsi Roma mendapatkan tanggapan positif. Pada 1964 imam CM pertama dari Italia, Rm. R. Siveri CM dan Rm. Carlo del Gobbo CM, tiba di Surabaya. Mereka ditugasi di Rembang pada 1965, disusul 2 orang pada 1966 ditugaskan di Blora, dan pada 1967 di Karesidenan Madiun. Pada 1971, total terdapat 12 imam CM Provinsi Roma bekerja di Keuskupan Surabaya, di Wilayah Barat (Madiun dan sekitarnya) - Utara (Blora Rembang dan sekitarnya).⁷³

Selain itu, dalam perjalanan waktu ketenagaan imam kian bervariasi dengan tahbisan romo-romo CM asal Indonesia, termasuk para siswa yang mengawali Seminari Menengah Dinoyo. Dari 1957 sampai 1984 ditahbiskan 36 orang imam. Jumlah ini dikurangi 9 imam yang mengundurkan diri. Mgr. Klooster sendiri selama menjadi Uskup telah menahbiskan 30 Imam CM dan 5 imam projo. Sejak 1971, sebagian imam pindah ke Malang berkarya di Seminari Tinggi CM. Sebelumnya pada 1968 Rm. Paul Janssen CM lebih dahulu pindah dari Madiun ke Malang mendirikan IPI. Sementara itu di Surabaya beberapa imam SVD ambil bagian dalam karya Keuskupan.⁷⁴

Dengan konfigurasi imam seperti ini, paroki-paroki baru dan gereja-gereja didirikan. Di kota Surabaya didirikan Gereja St. Mikael, St. Yohanes Pemandi, St. Maria Tak Bercela, Ratu Pencinta Damai, Gembala Yang Baik. Di luar Surabaya didirikan gereja Karangpilang, Sidoarjo, Jombang, Warujayeng, Kediri Timur, Tulungagung, Blitar Barat, Wlingi, Mojorejo, Ngawi, Walikukun, Ponorogo, Magetan,

⁶⁷ Laksito, *Mendidik*, 167.

⁶⁸ Laksito, *Mendidik*, 168.

⁶⁹ Laksito, *Mendidik*, 167-168.

⁷⁰ Laksito, *Mendidik*, 192.

⁷¹ Laksito, *Mendidik*, 193.

⁷² Laksito, *Mendidik*, 188.

⁷³ Laksito, *Mendidik*, 190.

⁷⁴ Laksito, *Mendidik*, 190-192.

Gereja Oikumene Maospati, Rembang, Lasem, Blora, dan Babad. Selain itu, didirikan kapel-kapel di stasi-stasi luar Surabaya.⁷⁵

Dari sisi kelembagaan Gereja, perkembangan terlihat dari ditunjuknya Rm. A.J. Dibjokarjono sebagai Vikaris Jenderal pada 1964. Juga dibentuk Dewan Keuskupan, serta Dewan Imam pada 1968 yang anggotanya terdiri dari “imam-imam wakil daerah”⁷⁶ Dibentuk Panitia APP, Pengembangan Sosial Ekonomi, Liturgi, Kateketik, Komunikasi Sosial, Pembinaan Generasi Muda, Panggilan, dan Karya Kepausan.⁷⁷

2.3.3 Karesidenan Rembang: Revisi Strategi Misi

Melihat perkembangan sampai saat ini, ada catatan yang patut diberikan terkait Karesidenan Rembang. Wilayah ini pada era Prefektur Apostolik tidak menunjukkan kemajuan berarti.

Seperti pembahasan sebelumnya, para misionaris memilih daerah Blitar dan kemudian Kediri sebagai kawasan yang secara khusus dikembangkan sebagai daerah misi. Hasilnya terbukti dari data-data selama masa Prefektur Apostolik, baik terkait dengan penempatan imam dan tarekat religius, jumlah umat non-Eropa, jumlah sekolah, jumlah gereja atau kapel, dan seterusnya.

Melihat pesatnya perkembangan misi di Karesidenan Kediri, tak dapat dipungkiri bahwa salah satu faktor utama adalah penerimaan penduduk setempat terhadap karya misi. Sementara di Karesidenan Rembang kondisinya cukup berbeda. Kesulitan-kesulitan yang timbul tidak memungkinkan misi berjalan lancar.

Tenaga misionaris di Cepu yang hanya 1 orang, dan baru pada 1937 menjadi 2 orang, dari semula diberikan kepada orang Katolik Eropa dan Katolik non-Eropa yang bekerja di perusahaan minyak BPM. Mereka mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup tinggi dibandingkan dengan penduduk setempat. Orang-orang Jawa yang bekerja di BPM

sebagai juru tulis rata-rata lulusan MULO atau AMS, dengan kemampuan berbahasa Belanda di atas rata-rata. Sementara orang-orang Jawa setempat rata-rata tidak berpendidikan dan tinggal di pedesaan. Adanya kesenjangan ini berdampak pada rasa sungkan dan rendah diri untuk mendekat pada penduduk setempat. Karena mayoritas umat Katolik di kota warga Belanda atau mengerti bahasa Belanda, maka khotbah-khotbah dilakukan dalam bahasa Belanda, sementara doa-doa dilakukan dengan bahasa Latin. Khotbah berbahasa Jawa dilakukan pada Minggu ke-4 setelah misa, sehingga orang-orang non-Jawa bisa pulang lebih dahulu. Perjalanan dinas ke luar Cepu, misalnya ke Blora, Rembang atau Bojonegoro juga ditujukan terutama kepada warga Belanda sehingga doa-doa juga dilakukan dalam bahasa Belanda.⁷⁸

Di sisi lain, sekolah khusus untuk orang Jawa lama tidak bisa didirikan. Patut dicatat bahwa pada 1928 di Randublatung, di sebelah barat Cepu, terdapat pusat kehutanan yang mendapat kunjungan dari imam dari Surabaya. Antara 1932-1937, hanya didirikan satu stasi di Tapelan, di selatan Cepu. Ada gereja kecil dan guru/katekis. Di sini terdapat kelompok masyarakat Samin. Semula dikira bahwa misi akan berhasil. Namun karena adat kebiasaan orang Samin tak sesuai dengan iman Katolik, maka misi tidak membawa hasil.⁷⁹

Kelak, dengan berdirinya paroki-paroki di wilayah ini sejak masa Vikariat Apostolik dan masih berlanjut pada masa Keuskupan, khususnya sejak kepemimpinan Mgr. Klooster CM, terjadi revisi terhadap strategi misi pada masa Prefektur Apostolik. Jika semula Karesidenan Rembang tidak mendapat perhatian cukup, kini mendapat perhatian yang sama dengan wilayah lain. Upaya ini berlangsung sejak masa Vikariat Apostolik dan semakin terlihat setelah Keuskupan berdiri pada 3 Januari 1961.

Secara garis besar datanya adalah sebagai berikut. Setelah Cepu yang menjadi paroki sejak 1932, pada 1953 ditunjuk seorang imam untuk bertugas di Rembang, dan didirikan

⁷⁵ Laksito, *Mendidik*, 192.

⁷⁶ Tondowidjojo, *Sejarah*, 285.

⁷⁷ Laksito, *Mendidik*, 193-194.

⁷⁸ Laksito, *Mendidik*, 91.

⁷⁹ Laksito, *Mendidik*, 91-92.

paroki pada 1954. Pada 1961 ditunjuk seorang imam dan didirikan paroki Bojonegoro. Di Rembang pada 1964 romo CM Italia menggantikan romo CM Belanda, dan sesudah itu pada 1965 romo CM Italia juga masuk ke Blora. Blora sendiri menjadi paroki pada 1969. Sedangkan paroki Tuban berdiri tahun 1968, ditandai dengan berdirinya Gereja St. Petrus Tuban.⁸⁰

Keberadaan umat di paroki-paroki Cepu, Rembang, Blora, Bojonegoro dan Tuban juga disertai dengan pendirian sekolah-sekolah sebagai cara kehadiran Gereja di masyarakat setempat. Jika pada 1941 hanya terdapat 3 sekolah di seluruh Karesidenan Rembang, masing-masing di Tapelan, Rembang dan di Cepu arah Ngawi, maka di 5 paroki tersebut antara 1960-1984 telah berdiri 20 sekolah dari berbagai jenjang. Jumlah ini cukup berimbang dengan sekolah-sekolah di Karesidenan Madiun sebanyak 25 sekolah, di Karesidenan Kediri plus Paroki Jombang dan Mojokerto sebanyak 31 sekolah, dan di Surabaya dan sekitarnya sebanyak 24 sekolah. Dengan data ini juga dapat dipahami bahwa setelah sekian lama tidak mendapatkan perhatian cukup dari segi misi, maka sejak masa Vikariat Apostolik dan Keuskupan, wilayah Karesidenan Rembang telah mendapatkan perhatian yang lebih berimbang.⁸¹

2.3.4 Pembentukan Kevikepan

Dikaitkan dengan tujuan studi ini, dari perkembangan awal misi sampai terbentuknya Gereja Lokal Keuskupan Surabaya hingga masa kepemimpinan Mgr. Klooster CM berakhir Juni 1981,⁸² tidak ada pembagian wilayah misi atau wilayah gerejawi ke dalam bagian-bagian tertentu yang mengkoordinasi beberapa paroki menjadi satu bagian, entah sebagai distrik, regio, atau kevikepan secara formal. Sejak masa Prefektur Apostolik, Vikariat Apostolik, dan Keuskupan di bawah kepemimpinan Mgr. de Backere CM, Mgr.

Verhoeks CM dan Mgr. Klooster CM yang terlihat hanyalah pola tertentu kebijakan pengembangan wilayah dan penugasan imam yang memperhatikan kekhasan daerah yang ada di masing-masing Karesidenan. Dalam kurun waktu itu, paroki-paroki didirikan, namun masing-masing paroki berdiri sendiri-sendiri secara otonom tanpa ada hubungan yang mengikat dengan paroki lain.

Pembagian wilayah Keuskupan menjadi beberapa bagian di atas paroki yang mengkoordinasi beberapa paroki yang berdekatan baru terjadi pada masa kepemimpinan Mgr. Dibjokarjono, yang bertugas sebagai Uskup Surabaya sejak 16 Desember 1982. Tercatat bahwa pada 1983 dibentuk 3 Regio Kevikepan, yaitu masing-masing Regio Kevikepan Kodya Surabaya dan sekitarnya, Regio Kevikepan Selatan, dan Kevikepan Barat-Utara. Di tiap Kevikepan ditunjuk seorang Vikep atau Vicarius Episcopalis (Wakil Uskup), yang bertugas mengkoordinasi paroki-paroki dan berbagai karya di Kevikepan, serta menjadi jembatan antara paroki-paroki di kevikepan dengan Keuskupan.⁸³

Di Regio Kevikepan Kodya Surabaya terdapat 8 paroki di Kodya Surabaya, ditambah Paroki Tuban dan Mojokerto. Yang bertugas sebagai Vikep adalah Rm. C. Reksosubroto CM, yang sekaligus bertugas sebagai Pastor Paroki Katedral dan di Kuria juga bertugas sebagai Vikaris Jenderal dan anggota Tribunal. Regio Selatan terdiri dari Paroki Jombang, Pare, Kediri I dan II, Tulungagung serta Blitar I dan II, dengan Vikep Rm. S. Ponticelli CM yang sekaligus bertugas sebagai Pastor Paroki Tulungagung. Regio Barat-Utara terdiri dari Paroki Madiun, Magetan, Ponorogo, Ngawi, Rembang, Cepu, Blora, dan Bojonegoro, dengan Vikep Rm. Louis Pandu CM yang sekaligus bertugas sebagai Pastor Paroki Madiun.⁸⁴

Jika dilihat, pembagian wilayah oleh Mgr. Dibjokarjono di awal kepemimpinannya ini

⁸⁰ <https://keuskupansurabaya.org/page/paroki-santo-petrus-tuban/> Perayaan Hari Ulang Tahun Paroki mengambil hari peresmian Gereja oleh Mgr. Klooster CM pada 1968.

⁸¹ Laksito, *Mendidik*, 210.

⁸² Laksito, *Mendidik*, 198.

⁸³ Laksito, *Mendidik*, 233.

⁸⁴ Arsip Keuskupan, *I 12 Loka Karya Pastoral Keuskupan Surabaya 17-21 Februari 1986, Dari Uskup*.

secara garis besar mengikuti pola kewilayahan karesidenan. Regio Kevikepan I Kodya Surabaya dan sekitarnya praktis mencakup wilayah eks-Karesidenan Surabaya, dengan tambahan Tuban, dan dikurangi Jombang. Regio Kevikepan II mencakup wilayah eks-Karesidenan Kediri, dengan tambahan Jombang. Regio Kevikepan III mencakup wilayah eks-Karesidenan Madiun dan Rembang, dikurangi Tuban.

Pada awal kepemimpinan Mgr. Dibjokarjono terdapat 12 imam projo, 33 imam CM dan 8 SVD, dengan paroki 25 buah. Sebanyak 13 paroki dilayani oleh satu imam. Satu paroki dirangkap oleh Pastor Paroki lain.⁸⁵ Selama menjadi Uskup Mgr Dibjokarjono menahbiskan 23 imam Projo, 20 imam CM dan 3 imam SVD.⁸⁶ Dengan jumlah ini maka ada keleluasaan yang lebih besar dalam mengatur penugasan para imam.

Mgr. Hadiwikarta menggantikan Mgr. Dibjokarjono, mengawali tugasnya dengan 29 paroki pada 1994. Pada 1999 sudah menjadi 35 paroki, dan pada 2000 menjadi 36 paroki. Mgr. Hadiwikarta membagi wilayah Keuskupan menjadi 4 regio, dengan nama Kevikepan Regio I-IV. Maka terjadi penambahan 1 regio kevicepan dari sebelumnya di masa Mgr. Dibjokarjono yang hanya berjumlah 3 regio kevicepan. Kevikepan Regio I meliputi 16 paroki di wilayah Kotamadya Surabaya, Gresik dan Sidoarjo. Kevikepan Regio II meliputi 9 paroki di wilayah Mojokerto, Jombang, Pare, Kediri, Tulungagung, Wlingi, dan Blitar. Kevikepan Regio III meliputi 6 paroki di wilayah Madiun, Magetan, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo dan Pacitan. Kevikepan Regio IV meliputi 5 paroki di wilayah Bojonegoro, Blora, Cepu, Rembang dan Tuban. Dengan komposisi ini terlihat bahwa pengelompokan paroki-paroki tetap mengikuti pola pembagian wilayah eks-karesidenan. Kevikepan Regio I mencakup paroki-paroki yang ada di eks-Karesidenan Surabaya dikurangi Jombang dan

Mojokerto. Kevikepan Regio II meliputi paroki-paroki di eks-Karesidenan Kediri, ditambah Jombang dan Mojokerto. Kevikepan Regio III meliputi paroki-paroki di eks-Karesidenan Madiun, dan Kevikepan Regio IV meliputi paroki-paroki yang berada di eks-Karesidenan Rembang. Tuban, yang oleh Mgr. Dobjokarjono dimasukkan Regio Kevikepan Kodya Surabaya dan sekitarnya, oleh Mgr. Hadiwikarta dimasukkan ke asalnya yaitu eks-karesidenan Rembang.⁸⁷

Dengan perkembangan paroki yang demikian pesat, khususnya di Kota Surabaya, maka Mgr. Vincentius Sutikno Wisaksono, yang ditahbiskan pada 2007, mengadakan penataan ulang kewilayahan di Keuskupan. Pada tahun 2008 di Kevikepan Regio I sudah terdapat 21 paroki. Jumlah yang demikian besar mengharuskan adanya penataan ulang. Maka pada bulan Juli 2008 Mgr. Sutikno memekarkan wilayah Keuskupan menjadi 7 kevicepan. Dalam penamaannya tidak lagi dipakai istilah regio, dan penomoran juga ditiadakan. Kevikepan Surabaya Utara terdiri dari paroki Kepanjen, Perak, Pogot, Widodaren, Ngagel, Ketabang, dan Kenjeran. Kevikepan Surabaya Barat terdiri dari Paroki Algonz, Redemptor Mundi, Yakobus, Karangpilang, Tandes, Pagesangan, dan Gresik. Kevikepan Surabaya Selatan terdiri dari Paroki Katedral, Wonokromo, Gembala Yang Baik, Roh Kudus, Juanda, Tropodo, dan Sidoarjo. Kevikepan Kediri terdiri dari paroki Jombang, Mojokerto, Kediri I-II, dan Pare. Kevikepan Blitar terdiri dari paroki Tulungagung, Blitar I-II, Wlingi, Resapombo, dan Mojorejo. Kevikepan Madiun terdiri dari paroki Nganjuk, Madiun I-II, Magetan, Ponorogo, Ngawi, dan Klepu. Kevikepan Cepu terdiri dari paroki Rembang, Blora, Tuban, Bojonegoro, dan Cepu.⁸⁸ Nantinya sebelum pergantian tahun 2014, Paroki Nganjuk dilepas

⁸⁵ Arsip Keuskupan, *I 12 Loka Karya*.

⁸⁶ <https://www.keuskupansurabaya.org/page/sejarah-pemekaran-wilayah-pastoral>

⁸⁷ <https://www.keuskupansurabaya.org/page/sejarah-pemekaran-wilayah-pastoral>

Menurut Mgr. Hadiwikarta, jumlah paroki pada tahun 2000 di Kevikepan/Regio I Surabaya, Gresik dan

Sidoarjo ada 16 paroki.
<https://www.keuskupansurabaya.org/page/keuskupan-surabaya-dari-awal-hingga-tahun-2020/>

⁸⁸ <https://www.keuskupansurabaya.org/page/sejarah-pemekaran-wilayah-pastoral/>

dari Kevikepan Madiun dan dimasukkan ke Kevikepan Kediri.⁸⁹

Sepuluh tahun kemudian, pada 2018, dengan jumlah paroki 46 Mgr. Sutikno melakukan pemekaran dari 7 menjadi 8 kevikapan. Kevikepan Surabaya Utara dan Selatan tetap. Kevikepan Surabaya Barat dikurangi paroki Gresik. Kevikepan Mojokerto meliputi Paroki Mojokerto, Bojonegoro, Gresik, dan Tuban. Kevikepan Kediri meliputi Paroki Jombang, Kediri I-II, Pare, Nganjuk. Kevikepan Blitar terdiri dari paroki Blitar I-II, Wlingi, Tulungagung, Resapombo, dan Mojorejo. Kevikepan Madiun meliputi paroki Madiun I-II, Magetan, Ponorogo, Klepu, dan Kuasi Paroki Kristus Raja Ngrambe. Kevikepan Blora terdiri dari paroki Blora, Rembang, Cepu, dan Ngawi.⁹⁰

Selanjutnya, pada 2021 dilakukan perubahan komposisi paroki di sebagian kevikapan, dengan jumlah kevikapan tetap sebanyak 8 buah. Kevikepan Surabaya Utara, Selatan, dan Barat tetap. Kevikepan Mojokerto dikurangi paroki Tuban dan Bojonegoro, ditambah paroki Jombang dan Krian. Kevikepan Kediri dikurangi Paroki Jombang. Kevikepan Blitar tetap. Kevikepan Blora dikurangi Paroki Ngawi dan ditambah Paroki Tuban dan Bojonegoro. Kevikepan Madiun ditambah paroki Ngawi.

2.3.5 Analisis Kevikepan dan Arah Pengembangan Pastoral Kewilayahan

a. Analisis Umum

Hal pertama yang patut dicatat adalah keputusan awal saat pendirian Prefektur Apostolik Surabaya pada 1928, untuk mempertahankan Karesidenan Rembang. Karesidenan ini pada 1928 dibagi menjadi Karesidenan Rembang dan Karesidenan Bojonegoro. Dalam format baru administrasi pemerintahan Hindia Belanda ini Karesidenan Rembang dimasukkan ke dalam Provinsi Jawa Tengah. Meskipun ada perubahan dalam administrasi pemerintahan, tetapi wilayah

Prefektur Apostolik Surabaya tetap dipertahankan. Keputusan ini diambil sehingga wilayah Prefektur Apostolik, Vikariat Apostolik, dan kemudian Keuskupan Surabaya mencakup separuh Jawa Timur khususnya bagian barat, dan dua kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

Di masa Prefektur Apostolik ternyata misi sulit untuk dikembangkan di daerah ini. Tetapi setelah Revolusi Kemerdekaan, diperoleh tenaga imam yang meskipun belum bisa menutup seluruh kebutuhan tetapi berperan besar, sehingga perkembangan misi di wilayah Karesidenan Rembang dapat terwujud. Setidaknya berdiri 5 paroki di 5 kota penting, dan sekolah-sekolah didirikan. Jika menilik kondisi persekolahan pada saat ini (2025) memang diperlukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap strategi misi wilayah ini. Namun wilayah yang terbilang paling jauh dari pusat di Surabaya ini tetap mempunyai umat dengan vitalitasnya yang tinggi.

Hal selanjutnya yang perlu dicatat adalah bahwa kebutuhan untuk membagi wilayah Keuskupan menjadi beberapa kevikapan baru muncul ketika terjadi pergantian pemimpin Keuskupan dari Mgr. Klooster CM ke Mgr. Dibjokarjono. Jika dihitung dari pembagian pertama pada 1983 maka pembentukan kevikapan di Keuskupan terjadi 56 tahun setelah Prefektur Apostolik didirikan, dan jika dihitung hingga saat ini pembagian wilayah ke dalam kevikapan-kevikapan sudah berlangsung 40 tahun lebih.

Jika di masa Prefektur Apostolik didirikan baru terdapat 6 paroki, maka pembagian ke dalam 3 kevikapan terjadi ketika sudah terdapat 25 paroki. Jika semula di masa Mgr. Dibjokarjono ada 25 paroki dengan 3 kevikapan, pada masa Mgr. Hadiwikarta menjadi 36 paroki dan 4 kevikapan, selanjutnya di masa Mgr. Sutikno menjadi 42 paroki dan 7 kevikapan, kemudian 46 paroki dan 8 kevikapan. Di sini terlihat peningkatan kompleksitas situasi dan kebutuhan pastoral yang ditanggapi dengan menetapkan kevikapan sebagai “format wajib” dalam

⁸⁹ Informasi berasal dari Rm. Y. Eka Budi Susila, yang pada saat itu bertugas sebagai Pastor Paroki Nganjuk, dan ditunjuk sebagai Vikep Kediri.

⁹⁰ <https://www.keuskupansurabaya.org/page/sejarah-pemekaran-wilayah-pastoral/>

mengelola paroki-paroki. Karakter “wajib” setidaknya terbukti dari bertambahnya jumlah kevikapan seiring dengan penambahan jumlah paroki.

Karakter “wajib” terkait adanya kevikapan ini dari segi tata organisasi dan tata kelola Keuskupan disebabkan karena nilai praktis kevikapan sebagai jembatan bagi paroki yang semakin banyak dengan Keuskupan sebagai induk organisasi. Fungsi jembatan atau “struktur tengah” ini sangat penting agar tidak ada satu paroki pun terabaikan di Keuskupan. Selain menjalankan fungsi jembatan ke Keuskupan, kevikapan sebagai himpunan beberapa paroki berfungsi sebagai forum koordinasi dan kerjasama di antara paroki-paroki dalam satu kevikapan. Fungsi ini sangat penting agar tidak satu paroki pun terpisah atau terisolasi dari kebersamaan. Adanya kevikapan dapat mengimbangi semangat parokialisme di satu sisi, dan mengurangi kemungkinan pengabaian suatu paroki oleh paroki di sekitarnya. Melalui kevikapan semangat persekutuan di antara paroki-paroki dan panggilan misioner kepada seluruh masyarakat di kawasan kevikapan dapat terjaga dan senantiasa dihidupkan.

Di satu sisi, penentuan wilayah Prefektur Apostolik Surabaya sebagai bagian dari Vikariat Apostolik Batavia tahun 1928 secara jelas dilaksanakan berdasarkan konsep karesidenan. Di sisi lain, pembagian wilayah Keuskupan ke dalam kevikapan pada 1983 meski terkait dengan aspek-aspek karesidenan, namun keterkaitan ini rupanya tidak tampil sebagai pilihan konseptual melainkan lebih didasarkan pada alasan praktis menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Hal ini tampak dari penempatan Paroki Jombang yang sebenarnya termasuk eks-Karesidenan Surabaya ke Regio Kevikapan Selatan yang mencakup paroki-paroki di wilayah eks-Karesidenan Kediri, sementara Paroki Tuban yang sebenarnya termasuk eks-Karesidenan Rembang masuk ke Regio Kevikapan Kodya Surabaya dan sekitarnya. Meskipun pengelompokan paroki ke dalam kevikapan tidak persis berbanding lurus dengan wilayah eks-Karesidenan, namun secara garis besar pola pembagian berbasis Karesidenan masih dapat ditelusuri dari pembagian keseluruhan.

Selanjutnya pembagian berbasis karesidenan ini terlihat pula pada penataan kevikapan periode selanjutnya, baik oleh Mgr. Hadiwikarta maupun oleh Mgr. Sutikno. Dengan kondisi pastoral makin kompleks dengan semakin banyak jumlah paroki, pola pembagian wilayah ke dalam kevikapan-kevikapan tetap berlangsung dengan karesidenan sebagai basisnya. Meski secara konseptual hal ini tidak dimaksudkan namun, dengan beberapa catatan kecil, praktis dalam konteks keseluruhan terdapat konsistensi pembagian berbasis eks-karesidenan. Konsistensi ini tampak dari pola pengelompokan paroki-paroki ke dalam kevikapan yang selaras dengan pengelompokan kabupaten-kabupaten dalam karesidenan. Seberapa konsistensi itu terjadi secara tepat atau persis akan dilihat pada analisis yang lebih khusus per eks-karesidenan, namun gambaran umum sudah memperlihatkan korelasi di antara kedua pengelompokan ini.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Layak diasumsikan bahwa keselarasan pembagian kevikapan dengan sistem karesidenan terjadi karena setiap karesidenan mempunyai karakter demografis, budaya, dan geografisnya sendiri sedemikian rupa sehingga perkembangan komunitas Kristiani pun selaras dengan perkembangan sosial kemasyarakatan di tiap-tiap karesidenan.

Dalam hal kesesuaian pembagian kevikapan berdasarkan karesidenan ini patut dicatat perubahan komposisi paroki di kevikapan yang pernah dilakukan pada 2018, yang ditandai dengan beberapa ketidaksesuaian. Kevikapan Cepu terdiri dari Paroki Rembang, Blora, Tuban, Bojonegoro, dan Cepu, diubah namanya menjadi Kevikapan Blora dengan komposisi paroki Rembang, Blora, Cepu dan Ngawi. Sebagai catatan, Paroki Ngawi semula masuk Kevikapan Madiun. Sementara Paroki Bojonegoro dan Tuban dimasukkan Kevikapan Mojokerto.

Dalam kenyataannya komposisi ini tidak bertahan lama. Pada 2021 Ngawi dikembalikan ke Kevikapan Madiun, sedangkan Bojonegoro dan Tuban dikembalikan ke Kevikapan Rembang. Bisa dikatakan bahwa kebijakan 2021 ini merupakan “koreksi” mengingat dari

sisi administrasi pemerintahan di masa lalu Kabupaten Ngawi termasuk Karesidenan Madiun, dan Kabupaten Bojonegoro dan Tuban termasuk Karesidenan Rembang. Demikian pula kini Paroki Ngawi tidak bisa dilepaskan dari Kevikepan Madiun dan Paroki Bojonegoro dan Tuban harus dikembalikan ke Kevikepan Rembang.

Pada saat sama, Paroki Jombang yang pada sejak 1984 selalu digabungkan dengan Kevikepan Kediri akhirnya pada 2021 ini “kembali ke habitatnya” yaitu Karesidenan Surabaya, karena sekarang digabungkan dengan Paroki Mojokerto, Krian, dan Gresik sebagai kawasan yang berada dalam lingkup eks-Karesidenan Surabaya. Dengan kembalinya Jombang ke kevicepan berbasis eks-Karesidenan Surabaya, maka Kevikepan Kediri kini murni beranggotakan paroki-paroki yang berbasis wilayah eks-Karesidenan Kediri.

b. Eks-Karesidenan Surabaya

Wilayah ini secara administratif meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto, serta Kabupaten Jombang. Dari komposisi paroki-paroki di kevicepan-kevicepan yang ada saat ini, tampak bahwa eks-Karesidenan Surabaya kini terbagi dalam 4 kevicepan, yaitu Kevikepan Surabaya Utara dengan 7 paroki, Surabaya Barat dengan 6 paroki, dan Surabaya Selatan dengan 7 paroki serta Kevikepan Mojokerto dengan 4 paroki, sehingga total terdapat 24 paroki. Selain itu di Surabaya Utara sedang disiapkan 2 calon paroki, yaitu Stasi Yosafat yang akan ditetapkan sebagai paroki pada 1 November 2025, dan Stasi Yohanes Gabriel Perboyre.

Dari segi kewilayahan, semua paroki di kevicepan ini berada di Kota dan Kabupaten eks-Karesidenan Surabaya. Maka secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat kesesuaian antara wilayah paroki-paroki yang termasuk ke dalam 4 kevicepan tersebut dengan wilayah eks-Karesidenan Surabaya. Hanya saja Stasi Kertosono, Warujayeng, dan Kedungrejo, yang secara administratif termasuk Kabupaten

Nganjuk dan eks-Karesidenan Kediri, dalam pastoralnya dimasukkan ke Paroki Jombang sejak pendirian Paroki tahun 1970 hingga saat ini.⁹¹ Dalam catatan Mgr. Dibjokarjono pada Loka Karya Pastoral Keuskupan Surabaya tahun 1986 Kertosono termasuk salah satu “stasi yang sudah waktunya menjadi paroki” bersama Pogot, Satelit Town, Sepanjang, Nganjuk, Wlingi.⁹² Namun, setelah hampir 40 tahun sejak catatan itu dibuat, keberadaan stasi ini sebagai bagian Paroki Jombang tetap dipertahankan.

Selain itu juga bisa dicatat bahwa pada 1984 Paroki Tuban, yang sebenarnya termasuk eks-Karesidenan Rembang oleh Mgr. Dibjokarjono pernah dimasukkan ke Regio Kevikepan I Kodya Surabaya. Pilihan ini diperkirakan karena Tuban lebih dekat ke Surabaya jika dibandingkan dengan ke Madiun. Pada saat itu Regio Kevikepan III, meliputi eks-Karesidenan Madiun dan Rembang, berpusat di Madiun dan Romo Vikep adalah Rm. Louis Pandu CM yang juga bertugas sebagai Pastor Paroki Madiun. Selain itu, Paroki Jombang yang di masa lalu termasuk eks-Karesidenan Surabaya oleh Mgr. Dibjokarjono dimasukkan ke Regio Kevikepan II yang termasuk Karesidenan Kediri.

Perlu diingat bahwa jumlah paroki di Keuskupan Surabaya hingga saat ini sebanyak 46 paroki. Dari jumlah tersebut, 25 paroki dan 2 calon paroki berada di di 4 kevicepan di wilayah eks-Karesidenan Surabaya, atau separuh lebih jumlah paroki Keuskupan Surabaya.

Sementara patut dicatat bahwa di masa depan, pengembangan beberapa paroki di kawasan ini masih terbuka, karena industri dan pemukiman di sekitar Surabaya Barat, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo terus bertambah. Contoh yang sekarang dikembangkan adalah Menganti di Kabupaten Gresik. Yang menjadi pemikiran lanjut adalah wilayah Kabupaten Lamongan yang tidak memiliki jumlah umat cukup banyak untuk dibentuk paroki, dan memiliki Stasi Babat yang menjadi wilayah Paroki Bojonegoro, dan Stasi

⁹¹ <https://keuskupansurabaya.org/page/paroki-santa-maria-jombang/>

⁹² Arsip Keuskupan, *I 12 Loka Karya*.

Lamongan yang merupakan bagian Paroki Gresik.

Untuk wilayah eks-Karesidenan Surabaya tidak tertutup kemungkinan jika di masa depan dibuat rencana pengembangan dan dilakukan penataan ulang wilayah kevikapan. Dengan kondisi saat ini dan potensi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa eks Karesidenan Surabaya, baik di Kota Surabaya maupun di wilayah Kabupaten Gresik dan Sidoarjo, merupakan daerah paling subur bagi perkembangan Gereja, dan hal ini sudah terbukti dari awal karya misi, yaitu pada masa Prefektur Apostolik.

c. Eks-Karesidenan Kediri

Wilayah ini secara administratif meliputi Kota dan Kabupaten Kediri, Kota dan Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek. Kabupaten Nganjuk, Jika melihat jumlah kevikapan dan paroki yang ada di sini, wilayah ini dapat dikatakan cukup subur bagi perkembangan Gereja. Di wilayah ini terdapat 2 kevikapan, yaitu Kevikepan Kediri dan Kevikepan Blitar. Di Kevikepan Kediri yang meliputi Kota dan Kabupaten Kediri serta Kabupaten Nganjuk terdapat 4 paroki. Di Kevikepan Blitar terdapat 6 paroki yang berada di wilayah Kota dan Kabupaten Blitar serta Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek. Di Kota dan Kabupaten Blitar sendiri terdapat 5 paroki.

Banyaknya jumlah paroki ini dapat dikaitkan dengan strategi para misionaris untuk menjadikan daerah Blitar sebagai pusat misi. Dengan segala kesulitan dan tantangan yang telah dialami, keberadaan 2 kevikapan dan 10 paroki ini bisa menjadi modal berarti bagi kehadiran Gereja di masyarakat sekitar.

Saat ini secara teritorial terdapat kesesuaian antara paroki-paroki yang termasuk dalam Kevikepan Kediri dan Blitar dengan wilayah eks-Karesidenan Kediri. Namun ada catatan. Di masa lalu, Paroki Jombang yang tidak termasuk eks-Karesidenan Kediri oleh Mgr. Dibjokarjono pernah dimasukkan Regio Kevikepan II Kediri. Hal ini dilanjutkan pada masa Mgr. Hadiwikarta dan Mgr. Sutikno pada 2008. Posisi ini masih berlanjut pada

pembagian tahun 2018. Selain itu, Paroki Mojokerto oleh Mgr. Hadiwikarta juga dimasukkan ke dalam Kevikepan Regio II yang meliputi eks-Karesidenan Kediri, dan oleh Mgr. Sutikno pada 2008 dimasukkan Kevikepan Kediri. Namun pada 2018 oleh Mgr. Sutikno Mojokerto dijadikan Kevikepan tersendiri bersama dengan Bojonegoro, Gresik dan Tuban. Lalu pada 2021 Jombang dilepaskan dari Kevikepan Kediri dan dimasukkan Kevikepan Mojokerto. Dengan demikian Kevikepan Kediri dan Kevikepan Blitar terdiri dari paroki-paroki yang memang berada di eks-Karesidenan Kediri.

Terdapat peluang pengembangan paroki di Kevikepan Kediri jika 3 Stasi yang termasuk Paroki Jombang yaitu Kertosono, Warujayeng dan Kedungrejo ditangani tersendiri atau disiapkan menjadi paroki. Selain itu, di wilayah Kevikepan Kediri direncanakan didirikan *Sanctuarium* Puhsarang pada 8 Desember 2025 ini sebagai suatu badan hukum tersendiri yang mengelola peziarahan. Kiranya ini menjadi kekayaan tersendiri.

Sementara itu di Kevikepan Blitar terdapat satu Calon Kuasi Paroki Ngeni, yang disiapkan menjadi paroki berikutnya di Kevikepan Blitar. Jika kelak menjadi paroki, maka di Kabupaten dan Kota Blitar saja akan terdapat 6 paroki. Selain itu juga ada pembahasan tentang kemungkinan menjadikan Stasi Slorok atau Garum sebagai Paroki.

Selanjutnya pengembangan Jalur Lintas Selatan pulau Jawa yang melewati bagian selatan Kevikepan Blitar, dan berlanjut sampai Kabupaten Pacitan patut diberi perhatian. Adanya Jalur ini layak diantisipasi dalam kaitan pengembangan Kevikepan di masa depan.

Lebih jauh, Stasi Trenggalek yang menjadi bagian Paroki Tulungagung di Kevikepan Blitar perlu diberi perhatian tersendiri. Stasi ini berada di kabupaten tersendiri, meskipun jumlah umat belum cukup untuk didirikan sebagai paroki.

Dalam konteks ini perlu dicatat bahwa di Keuskupan terdapat beberapa wilayah lain yang memiliki umat cukup banyak meski tidak mencapai ribuan, yang dari segi prospek perkembangan dan kehadirannya di masyarakat semakin baik jika didampingi

seorang imam. Wilayah tersebut yaitu: di Kabupaten Trenggalek dengan satu stasi besar yaitu Stasi Trenggalek, di Kabupaten Pacitan dengan stasi besar yaitu Stasi Pacitan, Di Kabupaten Ponorogo dengan stasi besar yaitu Stasi Slahung, di Kabupaten Lamongan dengan stasi besar yaitu Stasi Lamongan, dan di Kabupaten Rembang dengan stasi besar yaitu Stasi Lasem.

d. Eks-Karesidenan Madiun

Wilayah ini secara administratif meliputi Kota dan Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan. Wilayah eks-Karesidenan Madiun merupakan wilayah aktual Kevikepan Madiun. Jika melihat jumlah paroki yang ada di sini, wilayah ini dapat dikatakan cukup subur bagi perkembangan Gereja. Di wilayah ini terdapat 7 paroki, yaitu Madiun I-II, Ponorogo, Klepu, Ngawi, Ngrambe, serta Magetan. Selain itu, Stasi Pacitan sebagai bagian dari Paroki Ponorogo mendapat perhatian tersendiri dengan adanya imam yang ditugaskan mendampingi secara khusus. Potensi pendampingan serupa ada di Stasi Slahung, dengan jumlah umat yang cukup banyak dan karya Gereja bagi masyarakat berupa poliklinik dan, sebelum ini, sekolah.

Seperti Kevikepan Blitar yang memiliki paroki di kawasan pedesaan yaitu Resapombo, Mojorejo, dan Calon Kuasi Paroki Ngeni, di Kevikepan juga terdapat paroki dengan corak pedesaan. Pertama Paroki Klepu, dan kedua Paroki Ngambe. Hal ini menjadi kekhasan tersendiri yang dimaksudkan untuk lebih memberi jaminan bahwa umat di kawasan pedesaan juga mendapat pelayanan langsung dari para imam.

Pada 2008 oleh Mgr. Sutikno Paroki Nganjuk dimasukkan sebagai bagian Kevikepan Madiun. Namun pada 2014 oleh Mgr. Sutikno Paroki Nganjuk dikeluarkan dari Madiun dan dimasukkan ke dalam Kevikepan Kediri. Posisi terakhir ini lebih sesuai dengan keberadaan Kabupaten Nganjuk sebagai bagian dari Karesidenan Kediri. Posisi ini bertahan sampai saat ini.

Jika melihat riwayat pembentukan kevikapan, wilayah eks-Karesidenan Madiun

pada 1983 digabungkan dengan wilayah eks-Karesidenan Rembang sebagai Regio Kevikepan Barat-Utara. Saat itu pembagian kevikapan dilakukan dengan komposisi jumlah paroki yang cukup banyak untuk tiap-tiap kevikapan. Regio Kevikepan Kodya Surabaya dan sekitar terdiri dari 10 paroki, yaitu 8 paroki di Kodya Surabaya, ditambah Paroki Tuban dan Mojokerto. Regio Kevikepan Selatan terdiri dari 7 paroki, yaitu Kediri I-II, Blitar I-II, Jombang, Pare, Tulungagung. Kevikepan Barat-Utara terdiri dari 8 paroki, yaitu Madiun, Magetan, Ponorogo, Ngawi, Rembang, Blora, Cepu, Bojonegoro.

Pada 1999 Kevikepan Barat-Utara oleh Mgr. Hadiwikarta dijadikan 2 Kevikepan. Pertama Kevikepan Regio III terdiri dari paroki-paroki yang ada di eks-Karesidenan Madiun, dan Kevikepan Regio IV, terdiri dari paroki-paroki yang ada di eks-Karesidenan Rembang. Pada Mgr. Hadiwikarta pembagian menjadi 2 wilayah kevikapan ini membuat kedua kevikapan, yaitu Madiun dan Cepu benar-benar merepresentasikan sistem kewilayahan Karesidenan Madiun dan Rembang. Pola ini oleh Mgr. Sutikno dipertahankan pada pembagian kevikapan 2008, diubah sedemikian pada 2018 sehingga tidak betul-betul mencerminkan sistem karesidenan, namun dikoreksi dan menjadi sesuai kembali pada 2021.

Selain aspek parokial, Kevikepan Madiun memiliki kekhasan tersendiri karena selain di Surabaya, di sini juga terdapat pusat pendidikan Katolik sampai perguruan tinggi, yaitu Universitas Katolik Widya Mandala, dan STKIP Widya Yuwana. Kedua lembaga ini cukup mewarnai dinamika pastoral di kawasan Kevikepan, dan di masa depan berpotensi untuk lebih dikembangkan jika disinergikan dengan komunitas umat dan religius dalam Gereja.

e. Eks-Karesidenan Rembang

Analisis khusus keempat terkait wilayah eks-Karesidenan Rembang. Wilayah ini secara administratif meliputi Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Tuban. Kevikepan Blora secara

aktual meliputi paroki-paroki yang berada di wilayah eks-Karesidenan Rembang.

Di wilayah ini terdapat 5 paroki, yaitu Paroki Cepu dan Blora yang berada dalam satu Kabupaten, Paroki Rembang, Paroki Bojonegoro dan Paroki Tuban. Meskipun Cepu merupakan Kecamatan sedangkan Blora merupakan Kabupaten, namun jumlah umat Cepu lebih banyak dari jumlah umat Blora. Selain itu, secara historis, Cepu merupakan pusat Gereja untuk kawasan ini sejak zaman misi.

Saat ini Stasi Lasem sebagai bagian dari Paroki Rembang mendapat perhatian tersendiri dengan adanya imam yang ditugaskan mendampingi secara khusus. Pendampingan ini sebaiknya dipertahankan demi konsistensi dalam pelayanan umat dan demi perkembangan di masa depan. Tetapi memang jika demikian dibutuhkan ketersediaan imam dalam jumlah cukup.

Dalam sejarahnya, Paroki Tuban oleh Mgr. Dibjokarjono pada 1984 dimasukkan ke Regio Kevikepan Kodya Surabaya dan sekitarnya, namun pada 1999 oleh Mgr. Hadiwikarta dimasukkan Kevikepan Regio IV yang meliputi eks-Karesidenan Rembang. Pada 2018 Paroki Tuban dan Bojonegoro oleh Mgr. Sutikno dimasukkan Kevikepan Mojokerto, tapi pada 2021 dikembalikan ke Kevikepan Blora dalam kesatuan wilayah eks-Karesidenan Rembang.

Seperti telah disinggung di muka, kawasan eks-Karesidenan Rembang tidak dikembangkan secara maksimal oleh para misionaris pada era Prefektur Apostolik. Keberadaan yang berarti hanya di Cepu. Baru ketika periode Vikariat Apostolik, setelah Perang Kemerdekaan selesai, dan kemudian pada periode Keuskupan, pada masa kepemimpinan Mgr. Klooster CM, keberadaan Gereja di kawasan ini dikembangkan.

Upaya khusus yang ditempuh oleh Mgr. Klooster adalah dengan mempercayakan wilayah Karesidenan Rembang, Khususnya Rembang, Blora dan Cepu, serta Karesidenan Madiun pernah menjadi daerah misi khusus para imam CM Provinsi Roma Italia, yang datang secara bertahap sejak tahun 1964. Namun dalam perkembangan pada pertengahan 1970-an pengkhususan ini tidak

berlanjut. Kiranya pertama, karena perutusan imam dari Italia ke Keuskupan Surabaya berhenti setelah 1971. Kedua, karena para misionaris yang semakin menyatu dengan masyarakat Indonesia meninggalkan ide daerah misi khusus dan bersatu dengan CM Provinsi Indonesia.

Meskipun Gereja di Kevikepan Blora mengalami perkembangan sehingga mampu mengejar ketertinggalan khususnya dalam pembentukan jemaat, namun tantangan yang dihadapi kiranya masih membutuhkan perhatian khusus. Letaknya yang jauh dari Surabaya dan tiadanya sarana-prasarana memadai untuk kegiatan umat di tingkat kevikapan perlu mendapat perhatian dan jalan keluar. Begitu pula tantangan sosial-ekonomi dan kemunduran karya pendidikan Katolik perlu kajian lebih jauh.

3. Kesimpulan

“Penanaman Gereja” (*plantatio Ecclesiae*) hingga terbentuk Gereja lokal dan proses “perkembangan komunitas Kristiani” (*incrementum communitatis christianae*) yang harus diupayakan sesudahnya (AG 15) di Keuskupan Surabaya berlangsung dinamis. Ruang dan waktu menjadi medan pergulatan para subjek yang terdorong merealisasi misi yang diemban dari otoritas Gereja, yang hakikatnya adalah tugas ilahi. Meski menjumpai bermacam halangan, usaha tanpa henti mereka telah menghasilkan Gereja mandiri yang subjek-subjeknya adalah orang setempat.

Dari catatan sejarah terlihat bahwa bentuk Gereja yang dihasilkan ini di satu sisi sesuai dengan prinsip-prinsip kanonik, tapi di sisi lain amat dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik, yang tampil terutama dalam pola administrasi pemerintahan karesidenan yang dibangun di atas realitas geografis, demografis dan budaya setempat. Di satu sisi Gereja lokal ini memanfaatkan peluang kanonik untuk mengelola banyaknya paroki dengan membentuk sejumlah kevikapan yang menghimpun beberapa paroki, sementara di sisi lain pembentukan perangkat yang kanonik ini diterapkan berbasis sistem administrasi

publik yang bersifat sipil dan sekuler, yaitu karesidenan.

Sebelum itu, dialog antara yang kanonik dan penerapannya dalam sistem karesidenan telah berlangsung bahkan sejak pertama langkah dilakukan, yaitu pada saat wilayah misi dibagikan pada 1923. Hal ini diteguhkan pada 1928 saat Prefektur Apostolik didirikan. Setelah itu pendirian Vikariat Apostolik pada 1941 dan pendirian Keuskupan pada 1961 hanyalah meneguhkan pola langkah yang telah dilakukan di awal misi dimulai. Suatu persekutuan gerejawi yang di bangun di atas alas sistem karesidenan.

Dari kenyataan ini terlihat bahwa strategi pastoral teritorial misi di wilayah Keuskupan Surabaya telah terlaksana dengan baik, dengan menggunakan sistem karesidenan sebagai basis strategi. Hasilnya baik, berupa suatu Gereja yang hidup, dinamis dan mandiri, meskipun masih harus terus melangkah lebih jauh.

Pada 2028 kelak akan dirayakan 100 tahun Prefektur Apostolik Surabaya yang menandai, meski baru merupakan persiapan bagi, kehadiran “persekutuan hirarkis yang satu, kudus, katolik dan apostolik”. Perayaan ini tentu juga menandai era baru 100 tahun berikutnya. Dalam perspektif ke masa depan, dalam upaya “penguatan kevikapan” yang menjadi harapan saat ini patut dipertimbangkan sungguh dan dipelajari lebih dalam penerjemahan aspek kanonik ke dalam konteks lokal dengan melanjutkan strategi yang sudah berhasil dijalankan, yaitu strategi “penanaman Gereja dan pengembangan komunitas Kristiani” (AG 15) berbasis karesidenan.

Daftar Pustaka

Arsip:

Arsip Keuskupan Surabaya, *I 12 Loka Karya Pastoral Keuskupan Surabaya 17-21 Februari 1986, Dari Uskup.*

Dokumen Gereja:

Konsili Vatikan II, Dekret tentang Kegiatan Misioner Gereja *Ad Gentes*, dalam https://www.vatican.va/archive/hist_council

[s/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_lt.html](https://www.vatican.va/archive/hist_council)

Buku:

Laksito, Petrus Canisius Edi, *Mendidik Anak Bangsa. Geliat dan Pasang Surut 80 Tahun Yayasan Yohanes Gabriel Menjadi Indonesia*. Surabaya: Yayasan Yohannes Gabriel, 2005.

Lohanda, Mona, dkk. *Sejarah Sosial DKI Jakarta Raya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1984.

Nurcholis, Hanif, *Sejarah Pemerintahan Lokal/Daerah di Indonesia*, Modul 1, MAPU5204.

Ricklefs, M.C., *A History of Modern Indonesia since c.1200*. Third Edition. Hampshire: Palgrave, 2001.

Tondowodjojo, John, *Sejarah Perkembangan Keuskupan Surabaya*. Jilid I. Surabaya: Yayasan Sanggar Bina Tama, 2000.

Website:

<http://repository.widyamataram.ac.id>
<https://bakorwilbojonegoro.jatimprov.go.id>
<https://en.wikisource.org>
<https://id.wikipedia.org>
<https://jdihn.go.id>
<https://jesuits.id>
<https://keuskupansurabaya.org>
<https://ursulinindonesia.or.id>
<https://www.kratonjogja.id>
<https://www.catholic-hierarchy.org>
<https://www.ocarm.org>
<https://www.kawali.org>
<https://www.indonesiarailwaymap.com>